PENGUASAAN TANAH DAN KETENAGAKERJAAN DI KARESIDENAN SEMARANG PADA MASA KOLONIAL

Rachmat Susatyo

ISBN 978-979-17075-7-2

Kipas

PENGUASAAN TANAH DAN KETENAGAKERJAAN
DI KARESIDENAN SEMARANG
PADA MASA KOLONIAL

RACHMAT SUSATYO

Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial
2006

KATA PENGANTAR

Penguasaan atas anah sampai sekarang masih sering menimbulkan masalah, bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Masalah peranahan tidak jarang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, yang sumber permasalahannya ternyata banyak disebabkan oleh terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia; baik sejak pemerintahan kerajaan, pemerintahan kolonial, pemerintahan pendudukan jepang, maupun pemerintahan Indonesia. Jika dikaji lebih lanjut, ternyata semua masalah pertanahan tersebut antara lain disebabkan oleh pergantian kebijakan pertanahan dari pemerintah. Utamanya sejak munculnya perkebunan besar di Indonesia, yang banyak enggunakan lahan perkebunan yang luas.

Bagi masyarakat agraris, penguasaan atas tanah berarti lapangan kerja. Dengan demikian, tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat. Oleh sebab itu, tidak jarang untuk menguasai tanah tersebut sering dilakukan dengan cara yang ilegal. Ditambah lagi, ketidak pahaman masyarakat atas azas legal formal bagi pemilikan tanah. Hal ini masih diperkeruh oleh adanya oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat, dengan menyalah gunakan jabatan demi memperoleh keuntungan finansial.

Tulisan berjudul "penguasaan antah dan ketenagakerjaan di karesidenan Semarang pada Masa Kolonial" ini bermaksud untuk memberikan gambaran, bagaimana ikayan sosial maupun ikatan emosional warga masyarakat atas tanah. Tanah adalah lapangan kerja, kehilangan penguasaan atas tanah,

berarti kehilangan lapangan kerja, kehilangan lapangan kerja berarti kehilangan nafkah bagi kehidupannya.

Walupun permasalahan yang diungkapkan dalam tulisan ini terjadi di Karesidenan Semarang pada masa kolonial, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik bagi kita guna mengetahui permasalahan tanah dewasa ini. Bukankah sejarah adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, harapan penulis, tulisan ini diharapkan bukan saja bermanfaat bagi kalangan akademisi, tetapi juga bermafaat bagi pengambil kebijakan; juga bagi kita semua.

Bandung, 16 Maret 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN .....

BAB II GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH DAN PENDUDUK KEARESIDENAN SEMARANG 6

2.1 Letak Geografi dan Keadaan ALam 6

2.2 Hubungan Desa - Kota 14

2.3 Penduduk dan Pemerintahan Desa 18

BAB III PENGUASAAN TANAH DAN KETENAGAKERJAAN DI DAERAH KARESIDENAN SEMARANG 34

3.1 Mata Pencaharian Penduduk 34

3.2 Penguasaan Pemilikan Tanah 48

3.3 Upah Dan Ketenagakerjaan 58

BAB V KESIMPULAN 74

DAFTAR SUMBER 78

BAB I

PENDAHULUAN

Karesidenan Semarang sebagai salah satu karesidenan utama di Hindia Belanda, memiliki posisi strategis. Hal ini disebabkan oleh karena Karesidenan Semarang selain sebagai wilayah pengembangan agribisnis, juga disebabkan karena kota Semarang sebagai ibu kota, merupakan pintu gerbang utama bagi lalu lintas ekspor-impor dari dan ke wilayah Jawa Tengah. Tumbuhnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan menjadikan daya tarik tersendiri bagi penduduk, baik dari wilayah sekaresidenan maupun dari luar karesidenan. Dengan banyaknya penduduk yang mengadu nasib di berbagai sektor formal maupun informal, maka di Karesidenan Semarang memiliki mobilitas sosial baik yang vertikal maupun horizontal relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan karesidenan lainnya di Jawa Tengah. Terlebih lagi kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Jawa Tengah.

Tumbuhnya perkebunan swasta di Jawa, khususnya di Karesidenan Semarang pada masa kolonial, telah melibatkan penduduknya dalam mata rantai perdagangan internasional. Dari berbagai komoditas ekspor yang dihasilkan Karesidenan Semarang, gula dan

kopi merupakan primadonanya. Kopi yang semula merupakan komoditas utamanya, kemudian tergeser oleh gula. Tampilnya Indonesia sebagai salah satu penghasil utama gula di dunia, tidak terlepas dari peran perkebunan tebu dengan pabrik gula yang ada di Karesidenan Semarang, yakni di wilayah Kabupaten Kendal.

Kopi ditanam di tanah negara di sekitar kaki pegunungan Ungaran, sedangkan tebu bahan utama gula ditanam di dataran rendah pantai Utara Kabupaten Kendal. Lahan tanam tebu pada umumnya merupakan lahan pertanian yang sangat subur, khususnya sawah.

Bagi penduduk Pulau Jawa, pada mulanya menyewakan sawah atau tanah jarang sekali terjadi. Lebih banyak dijumpai benruk bagi hasil (*deelbouw*), dan hal ini dilakukan hanya jika tenaga kerja pemilik tanah serta keluarganya tidak cukup untuk mengerjakan sendiri tanahnya, dan dimaksudkan untuk menolong teman sedesanya. Beberapa pertukaran hasil tanah antara penduduk suatu desa dan antara penduduk beberapa desa memang sudah ada. Di banyak daerah sudah terdapat perdagangan pasar, tetapi volume perdagangannya kecil sekali dan hanya merupakan tambahan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri. Jadi faktor-faktor produksi dan hasil-hasil tanah hampir tidak diperjualbelikan, komersialisasi pertanian dan tenaga kerja dapat dikatakan belum membudaya. Uang memegang peranan kecil sekali, namun lambat laun, khususnya sejak sistem Tanam Paksa, sistem sewa tanah mulai membudaya di Jawa. Dengan demikian, uang sebagai alat tukar yang semula hanya dilakukan

oleh kalangan atas dan menengah, kemudian meluas pula dikalangan rakyat biasa. [1]

Bentuk-bentuk pemilikan tanah pertanian di Jawa antara lain: sawah, yang merupakan klasifikasi tanah terpenting bagi para petani Jawa untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Geertz, sawah tani di Jawa adalah hasil proses historis dari perkembangan kebudayaan, merupakan bagian terpenting dari lingkungannya. Sawah orang Jawa, sangat erat kaitannya dengan organisasi kerja, bentuk struktur desa, dan proses pelapisan masyarakat.[2] Bagi orang Jawa, berpisah dengan tanah itu berarti berpisah dengan rakyat, sebab berarti kehilangan jasa yang diberikan oleh rakyat yang tinggal pada tanah itu. Orang Jawa biasa memandang orang yang berhak atas hasil tanah itu. Orang Jawa biasa memandang orang yang berhak atas hasil tanah itu (*vruchtgebruiker*) sebagai orang atasannya. Maka menurut kebiasaan lama, ia mempunyai kewajiban memberikan jasa-jasa kepadanya. [3]

"Pemilikan Tanah" tidak selalu mencerminkan "penguasaan" tanah, karena ada berbagai jalan untuk menguasai tanah, yaitu misalnya melalui sewa, sakap, gadai, dan sebagainya. Pemilik tanah luas, biasanya tidak selalu menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya, pemilik tanah sempit dapat pula menggarap tanah

---

[1] D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (terjemahan Prajudi). Jilid I, Cetakan II, Jakarta: Pradjaparamita, 1960. hlm. 101-106. lihat pula Svein Aas, "relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa" dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984, hm. 120.

[2] Cliffortd Geertz, *Involusi Pertanian*, *Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983, hlm. 9.

[3] D.H. Burger, Op.Cit., hlm. 137-138.

orang lain melalui sewa atau sakap, di samping penggarapan tanahnya sendiri. Menurut Gunawan Wiradi, penduduk pedesaan dapat dikelompokkan menjadi: 1. pemilik penggarap murni, yaitu petani yang hanya menggarap tanahnya sendiri; 2. penyewa dan penyakap murni, yaitu mereka yang *tidak memiliki tanah*, tetapi memiliki tanah garapan melalui sewa/atau bagi hasil; 3. pemilik penyewa dan/atau pemilik penyakap, yaitu mereka yang disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah milik orang lain; 4. pemilik bukan penggarap; dan 5. Tunakisma mutlak, yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki tanah dan tidak punya tanah garapan (sebagian dari mereka ini adalah buruh tani dan hanya sebagian kecil saja yang memang bukan petani.[4]

Pemilik bukan penggarap, adalah para pemilik tanah pribadi, akan tetapi tidak menggarap ataupun mengerjakan sendiri tanahnya. Hal ini bisa saja terjadi, karena pekerjaan sebagai petani pada umumnya dianggap kurang bergengsi, atau ada yang beranggapan lebih menguntungkan dengan menyewakan tanahnya, atau dengan sistem bagi hasil. Menurut Breman, golongan ini merupakan lapisan teratas. Bukan hanya para *lurah*, tetapi juga tokoh-tokoh penting desa yang tidak mengerjakan sendiri tanahnya. Golongan demikian ini biasanya disebut *Priyayi*.[5]

Jadi jelas, bahwa pemilikan dan penggunaan tanah merupakan faktor terpenting terhadap strati-fikasi sosial masyarakat, bahwa pada umumnya jarak ekonomi antar golongan sosial sebanding dengan jarak sosial

---

[4] Gunawan Wiradi, "Pola Penguasaan tanah dan Reforma Agraria", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.) *Op. Cit*., hlm. 302-303.

[5] Jan Breman,

antar mereka.[6] Dalam hal ini, apabila pengusaan tanah merupakan dasar utama stratifikasi sosial masyarakat desa, maka ketimpangan distribusi penguasaan tanah merupakan sumber utama kemiskinan struktural di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila penguasaan tanah dasar utama stratifikasi sosial masyarakat pedesaan, maka polarisasi ekonomi yang bersumber pada ketimpangan distribusi penguasaan tanah akan membangkitkan polarisasi sosial di dalam masyarakat bersangkutan.[7]

Tumbuhnya perkebunan besar di Pulau Jawa, khususnya sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa, sudah barang tentu memberikan pengaruh yang besar pula terhadap masalah penguasaan dan pemilikan tanah maupun tenaga kerja yang ada. Perkebunan besar selain memerlukan lahan pertanian yang besar, tetapi juga memerlukan tenaga kerja yang besar pula. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai aspek kehidupan masyarakat terkait dengan masalah perkebunan besar, khususnya mengenai penguasaan, pemilikan tanah dan ketenagakerjaan yang terjadi.

---

[6] Selo Soemardjan, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan", dalam: Alfian (ed.), *Kemiskinan Struktural*: Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Pulsar Yayasan Ilmu Sosial, 1980, hlm. 9.

[7] Moh. Amaluddin, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede Kabupaten Kendal-Jawa Tengah,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 3-4.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH DAN PENDUDUK KARESIDENAN SEMARANG

2.1 Letak Geogafi dan Keadaan Alam

Karesidenan Semarang merupakan wilayah terpenting di Jawa tengah. Semarang sebagai ibu kota merupakan kota pelabuhan terbesar dan terpenting. Menurut *Ind. Staatblad 190 No. 175*, untuk Karesidenan Semarang diadakan Dewan Negeri. Berdasarkan Akte 15 Januari 1678, antara Kerajaan Mataram dengan Belanda, Semarang dengan semua distrik dan desanya diserahkan kepada Kumpeni. Berdasarkan kontrak selanjutnya, wilayah tersebut diperluas. Dari tahun 1973 sampai Kumpeni jatuh, Semarang merupakan wilayah Gubernur Utara Timur, dari Cilosari

sampai Pasuruan. Pada masa Deandels, Semarang merupakan daerah drostambt.[1]

Karesidenan Semarang di sebelah Barat berbatasan dengan Karesidenan Pekalongan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Karesidenan Kedu, Surakarta, Madiun. Di sebelah Timur dan Timur Laut berbatasan dengan Karesidenan Rembang dan Jepara, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Dalam abad ke-19, Karesidenan Semarang terdiri dari 5 kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, dan Grobogan; 8 kawedanaan (*afdeeling*) yakni: Semarang, Salatiga, Ambarawa, Kaliwungu, Kendal, Selokaton, Demak, dan Brobogan dan 24 kecamatan.

Secara administratif Karesidenan Semarang pada akhir abad ke-19 terdiri dari 8 *afdeeling*, yaitu Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, dan Jepara. Akan tetapi kemudian, daerah Salatiga dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Semarang.[2] Sesudah abad ke-19, Karesidenan Semarang mengalami beberapa perubahan administratif, sebagai contoh: dalam tahun 1901, 1929, dan 1930. reorganisasi administratif dalam tahun 1901 ke dalam Karesidenan Semarang dimasukkan Karesidenan Jepara, yang selanjutnya dibagi dalam kabupaten-kabupaten

---

[1] Hartono Kasmadi dan Wiyono (eds.), Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-0950), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventerisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985, hlm. 9. Lihat pula: Encyclopedie van Nederlandsch-Indie (ENI), Bagian III, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1929, hlm. 742.

[2] *Ibid*., hlm. 74-741. Lihat pula: Djoko Suryo, Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the Later 19th Century, Tesis Doktor pada Monasch University Australia, 1982, hlm. xvii. Lihat pula: Hartono Kasmadi dan Wyono (eds.) , *Op. Cit*., hlm 8.

Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, dan Jepara.[3]

Tahun 1929 batas-batas ini mengalami perubahan lagi, dan Karesidenan Semarang dibagi dalam dua kabupaten, yakni Semarang dan Kendal. Beberapa kabupaten lainnya dijadikan beberapa karisedenan. Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara menjadi karisedenan Kudus. Kabupaten-kabupaten Grobogan dan Blora menjadi Karesidenan Blora, sedangkan Kabupaten-kabupaten Pati dan Rembang dimasukkan ke dalam Karesidenan Rembang. Akhirnya pada tahun 1930, batas wilayah Karesidenan Semarang dikembalikan lagi seperti pada waktu abad ke-19, yakni terdiri dari Kabupaten-kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan.[4]

Karesidenan Semarang terdiri dari daerah pegunungan di sebelah selatan, dan daerah dataran rendah di sebelah utara. Di daerah pegunungan merupakan daerah tanaman kopi pemerintahan, khususnya ketika Sistem Tanam Paksa (*Cultiavtion System*) diterapkan di daerah ini. Jenis lain tanaman pemerintahan di karesidenan ini ialah tebu, tetapi tanaman ini hanya terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Kendal.[5]

Pegunungan yang dimulai dari daerah Pekalongan yang membentuk *plateu* yang cukup luas, menyempit ke arah timur sampai mencapai beberapa baris. Meskipun memiliki banyak puncak, masih dapat dikatakan datar, sehingga dapat dilalui jalan pos. Di bukit itu terdapat banyak hutan jati dan juga tanah yang belum diolah. Perbukitan antara 3-400 meter yang sebagian dengan tebing-tebingnya sampai di laut,

---

[3] Djoko Suryo, Op. Cit., hlm. xvii-xviii.
[4] *Ibid*., hlm. xviii
[5] *Ibid.*

mempunyai kecuraman yang besar dan menggelombang sampai daerah pantai. Pantai-pantai yang tinggi dan curam in imasih berhutan. Dahulu hutan ini lebih besar dan diberi nama hutan Weleri, sesuai dengan nama desa di dekatnya.[6]

Di dekat pantai, dataran yang tingginya hanya 200-300 meter, rangkaian perbukitan terus naik sampai ke kaki gunung Merapi. Rangkaian perbukitan ini sampai rangkaian yang terakhir terputus-putus karena erupsi yang menutup saluran dari rawa di Ambarawa, akhirnya sampai ke gunung Payung dengan ketinggian 718 meter. Rawa-rawa yang ada pada ketinggian 500 meter dengan luas waktu itu (tahun 1900-an) sekitar 55 kilometer mengalirkan airnya lewat sungai Tuntang yang berkelok-kelok menghindari bukit-bukit dengan air terjunnya yang indah. Rawa itu dikenal dengan nama Rawa Pening, yang dikelilingi oleh sawah-sawah dan kebun-kebun pen-duduk di sekitarnya.[7]

Perkebunan di daerah pegunungan semuanya menggunakan tanah dengan hak usaha guna. Perkebunan itu mengusahakan hasil bumi untuk ekspor, seperti: karet, kopi, teh, kina, kapok, cacao, lada, pala dan panili. Tiap perkebunan biasanya menghasilkan lebih dari satu macam hasil bumi. Tenaga kerja bagi perkebunan itu cukup banyak. Hanya pada waktu musim tanam dan musim panen, tenaga kerja terasa kurang. Tenaga kerja ini berasal dari daerah sekitarnya. [8]

Perusahaan pertanian di Kabupaten Kendal, terutama berupa pabrik gula, seperti: Cepiring, Gemuh dan Kaliwungu. Di antara ketiga pabrik gula ini, yang

---

[6] P.J. Veth, *Java: Geograpisch, Ethnologish, Historish,* Cetakan II, Jilid III, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912, hlm. 438.

[7] *Ibid.*

[8] Memori Residen Semarang, Memori Serah Jabatan 1921-1930, Arsip Nasional, Jakarta: 1977, hlm. XLIII.

baik adalah pabrik gula Cepiring. Pabrik ini tergolong yang paling "modern" dan perlengkapannya paling baik di seluruh pulau Jawa. Pabrik gula Cepiring dan Gemuh, pemiliknya ialah *N.V. tot Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken*. Pabrik gula Kaliwungu pemiliknya N.V. Cultuurondernemming "*Kaliwungu-Plantaran*" yang penjualan produksinya dilakukan oleh *Cultuurmatschappij der Vorstenlanden*. Pabrik gula Kaliwungu, keadaannya tidak sebaik pabrik gula Cepiring dan Gemuh, sebab areal lahannya tidak sebaik tanah pabrik gula Cepiring dan Gemuh. Selain itu, instalasinya juga sudah usang.[9]

Di Kabupaten Kendal terdapat hutan jati yang luasnya sekitar 12.800 hektar dan termasuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (*houtvesterij*) Kendal, sedangkan *opperhoutvester*-nya berkedudukan di Boja. Penebangan kayunya pada waktu itu (awal 1900-an) dilakukan oleh kontraktor swasta, tetapi bila kontraknya habis, penebangan dilakukan melalui tempat pengumpul kayu (TPK) di Kaliwungu, Mangkang, dan Pegadon. Selain hutan jati Kendal, hutan jati di Karesidenan Semarang terdapat juga di Baringin (Salatiga), masuk daerah hutan jati Kedungjati.[10]

Hasil bumi untuk perdagangan yang diusahakan oleh penduduk pribumi, ialah tembakau. Tembakau ini ditanam di Distrik Kendal, Weleri dan Seloketon. Bagi penduduk, usaha tani tembakau ini mempunyai arti ekonomi yang sangat penting. Luas tanaman seluruhnya 5.000 hektar. Hasil bumi untuk perdagangan lainnya, ialah kopi. Kebun kopi penduduknya kebanyakan berasal dari kebun kopi pemerintahan yang sudah dihapuskan. Sebagian kebun kopi itu masih ada

---

[9] *Ibid.* hlm. XLV.
[10] *Ibid.,* hlm. LI.

yang diusahakan, tetapi ada juga yang dibongkar dan tanahnya dijadikan tanah persawahan atau tegalan. Luas kebun kopi penduduk di daerah Semarang seluruhnya sekitar 1.500 bau. Adapun hasil bumi lain yang diusahakan rakyat di daerah pegunungan Salatiga, Getasan dan Kopeng ialah sayuran dan bunga-bungaan.[11]

Selain Kendal, Demak pada tahun 1905 merupakan *afdeeling* dan *regentschap* Karesidenan Semarang dengan luas 1443 kilometer persegi. Terdiri dari dua *Controla Afdeeling*, masing-masing dengan tiga distrik, yaitu *Controla Afdeeling* Demak dengan Distrik Demak, Wedung, dan Grogol. *Controla Afdeeling* Gubug dengan Distrik Manggar, Sambung dan Singen Kidul. Akhir tahun 1905 *afdeeling* Demak memiliki sekitar 370.000 penduduk, diantaranya 200 orang Eropa dan 2.200 Cina. Di *afdeeling* ini terdapat perkebunan swasta yang mengambil tempat seluas 100 kilometer persegi. Demak sebagai ibu kota kabupaten, terletak pada ketinggian 10 meter di atas laut. Di kabupaten Demak dilintasi jalur kereta api yang menghubungkan Semarang dengan Rembang. Dari Demak terdapat cabang jalan kereta api ke arah tenggara, melalui Purwodadi ke Blora dan Gundi, yang selanjutnya bergabung dengan jalan kereta api Semarang-*Vorstenladen* (Surakarta dan Yogyakarta).[12] Bagi tuan-tuan tanah, Demak bukan pilihan. Baru pada permulaan abad ke-19 terjadi pengusahaan tanah yang sebagian besar masih rawa-rawa. Di musim penghujan menjadi telaga yang diberi nama Laut Dalam, yang dapat diseberangi dengan perahu-perahu yang cukup besar. Pada zaman Daendels, pernah diusahakan pembuatan

---

[11] *Ibid.,* hlm. XLII.

[12] ENI I, *Op. Cit*., hlm. 581.

jalan pos, di samping itu pernah diusahakan menggali kanal untuk pelayaran perahu, tetapi kurang berhasil. Kanal tersebut bila musim kemarau menjadi kering, sehingga hanya pada musim penghujan dapat digunakan untuk pengairan tanah di sebelah utaranya.[13]

Di sebelah timur Demak, terletak kota Kudus. Kudus merupakan kota yang menurut Veth, "luar biasa", karena adanya kota tua, atau Kudus Kulon. Di Kudus juga terdapat mesjid besar yang memiliki gerbang dan menara berbentuk bangunan Majapahit. Di *afdeeling* Kudus terdapat 3 buah pabrik gula dari perusahaan perkebunan Jepara, yang memilik pabrik gula Rendeng dan Tanjungmojo.[14]

Kudus merupakan *afdeeling* dan *regentschap* dari Karesidenan Semarang, dengan dataran yang luasnya 590 kilometer persegi. *Afdeeling* ini terdiri dari satu controle *afdeeling* dan 4 distrik, yakni: distrik Kudus, Cendana, Undakan dan Tenggeles. Penduduknya pada akhir tahun 1915 berjumlah 287.000 jiwa, di antaranya 380 Eropa, 4.300 Cina dan sekitar 40 Timur Asing lainnya. Di *afdeeling* bagian timur, di distrik Undakan terdapat Rawa Gede, suatu rawa yang besar yang meluas melewati perbatasan dengan distrik Kajen. Pembuangan air rawa ini adalah sungai Juwana.[15] Batas barat kota Kudus adalah Kali Serang, yang pada kedua sisinya dibangun bendungan. Di Wilalung, distrik Undakan, dibangun sebuah pintu air yang besar, yang mengatur air banjir dari Tanggulangin ke sungai Babala, dan sungai Juwana.

Kudus terletak pada persimpangan jalan kereta api uap Semarang-Lasem, dan pada persimpangan ja-

---

[13] P.J. Veth, Java III, Op. Cit., hlm. 463-464.
[14] Ibid., hlm 472-473. lihat pula : ENI II, Op. cit., hlm. 358.
[15] ENI II, *Op. Cit*., hlm. 358.

lan pos besar (*grooten postweg*). Kudus juga memiliki sarana dan prasarana perhubungan dengan Jepara, kota di sebelah utaranya. Pada tahun 1615, Jepara dapat disebut sebagai kota pelabuhan kerajaan Mataram yang baik. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-18, Jepara mengalami kemunduran. Jepara kemudian menjadi kota "mati", dengan jalan-jalan yang lebar dan alun-alun yang indah. Kampung-kampung berdampingan tanpa ada putusnya, menuju selatan sampai Tanggulangin. Di ujung timur dari dataran yang sempit dan padat penduduknya, terdapat banyak kampung dan juga sawah untuk tanaman padi atau tanaman tebu, yang tersebar di kaki gunung Muria.[16]

Semua kota kabupaten di Karesidenan Semarang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang cukup baik. Sejak tahun 1900-an, lalu lintas dalam negeri semakin berkembang pesat. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, telah dibuat jalan darat, jalan kereta api, dan pelabuhan (Semarang) yang merupakan pelabuhan utama di Jawa tengah. Pengangkutan dengan mobil telah berkembang setelah Perang Dunia I, dan penerbangan setelah tahun 1930. di Jawa, jalan kereta api dibuat karena alasan ekonomi, yaitu untuk mengangkut hasil perkebunan maupun perusahaan untuk ekspor.[17]

Dari lima kabupaten yang ada di Karesidenan Semarang, antara tahun 1837-1845, hanya Grobogan dan Salatiga yang tidak dilalui jalur jalan Deandels, yang merupakan jalan lintas Jawa pertama. Kabupaten Kendal, Semarang, dan Demak berada pada lintasan jalan tersebut, sehingga memiliki mobilitas sosial yang

---

[16] P.J. Veth, Java III, *Op. Cit*., hlm. 470 dan 472-473.

[17] *Sejarah Daerah Jawa Tengah*, Depdikbud, Jakarta: 1978, hlm. 152.

cukup tinggi. Namun Salatiga, sekalipun tidak berada di lintasan jalan Deandels, tetapi dilintasi jalan raya propinsi dari Semarang ke Surakarta. Jalan Semarang-Surakarta ini, terdapat simpang jalan Bawen-Ambarawa-Magelang, dan Salatiga-Getasan-Kopeng-Magelang. Jalan propinsi ini semuanya sudah diaspal, kecuali jalan Salatiga-Getasan-Kopeng-Magelang. Sedangkan jalan yang dahulu milik Karesidenan, sejak tanggal 1 Januari 1930 diserahkan kepada kabupaten. Jalan-jalan ini pada umumnya belum diaspal.[18]

2.2 **Hubungan Desa-Kota**

Guna mengetahui lebih mendalam tentang penguasaan tanah dan ketenagakerjaan di Karesidenan Semarang, tidak bisa lepas dari desa. Hal ini bukan saja disebabkan karena sebagian besar penduduknya berada di pedesaan, tetapi jiga disebabkan karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di desa.

Desa yang dikenal sekarang, adalah desa yang dilihat dari sudut pandang hukum, yang biasanya memusatkan perhatiannya kepada tata-aturan yang mengatur kehidupan manusianya dan oleh sebab itu, lebih menekankan kepada faktor-faktor wilayah, jumlah penduduk, dan tata-cara administrasi. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1979, "desa" didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dan berhak menye-

---

[18] Memori Residen Semarang, *Op. Cit*., hlm. L.

lenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19]

Pandangan atau pengertian "desa" sekarang dengan pengertian "desa" pada zaman kolonial, sudah barang tentu berbeda, hal ini bukan saja disebabkan oleh karena terjadi pergantian sistem dan bentuk pemerintahan, dari negara koloni menjadi negara merdeka; tetapi juga disebabkan adanya perubahan masyarakatnya. Dalam bukunya: *Pembahasan Undang-Undang 1965 No. 19 tentang Desa Praja*, The Liang Gie antara lain menyebutkan: "... pengertian desa, sebagai daerah otonomis tingkat terbawah menurut Undang-Undang 1948/22, adalah lain dengan desa sebagai *Inlandsch Gemeente* menurut IGO/IGOB".[20] IGO (*Inlandsch Gemeente Ordonantie*) memberikan kemandirian kepada desa, tetapi disamping itu geraknya juga lebih dibatasi. Khususnya hal-hal yang mengenai kepemilikan tanah, diatur sampai mendetail dan meliputi hampir 25% dari pada seluruh peraturan.[21]

Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur (Daerah, Penduduk dan Tata Kehidupan), yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human efforts*) dan tata geografi (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada "*human efforts*" umtuk memanfaatkan daerahnya. Tiap desa mempunyai "*geographical setting*"

---

[19] Lihat C.S.T. Kansil, 'Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa', dalam: Gunawan Wiradi, " Mengenal Desa dan Perkembangannya Secara Selayang Pandang", *Makalah*, Yogyakarta: PAU Universitas Gadjah Mada Tanggal 10-11 Februari 1988, hlm.2.

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, *dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 13.

Soedjoto Sosrodiharjo, *Perubahan Struktur Masyarakat Jawa: Suatu Analisa*, Yogyakarta: Penerbit Karya, 1968, hlm. 83-84.

dan "*human efforts*" yang berbeda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduknya tidak sama.[22]

Dalam hubungannya dengan kota, maka ada desa yang merupakan "*hinterland*" atau daerah dukung. Desa yang demikian berfungsi sebagai daerah pensuplai bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, disamping bahan makanan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan dan bahan makan lain yang berasal dari hewan. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw materials*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Sedangkan ditinjau dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.[23]

Kota yang biasa disebut sebagai rural dan desa dengan "urban", meskipun merupakan konsep yang bermanfaat, tetapi sebenarnya di antara kedua pengertian itu tidak terdapat batas-batas yang tegas, nyatanya, perkembangan kota sendiri mendorong suburbanisasi, yakni lahirnya daerah pinggiran kota, begitu juga kemajuan pedesaan menjadikannya mengalami urbanisasi pula.[24]

Sehubungan dengan terjadinya kemajuan yang dicapai oleh desa maupun kota, maka mengakibatkan terjadinya perubahan mengenai jumlahnya. jumlah desa di Karesidenan Semarang dari tahun 1820-1845, adalah sebagai berikut:

---

[22] Bintarto, *Op. Cit*, hlm. 14.

[23] *Ibid*, hlm. 15-16.

[24] Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 128.

Tabel I
Jumlah Desa di Karesidenan Semarang 1820- 1845

Tahun	Jumlah Desa
1820	2904
1832	2442
1837	2671
1845	3330

Sumber: Djoko Suryo, Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the Later 19th Century, Tesis Doktor pada Monash University, December 1982, hlm. 5. Jumlah desa dalam tabel di atas tidak termasuk desa-desa di Jepara.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah desa yang ada di karesidenan Semarang mengalami pasang surut, hal ini terjadi disebabkan karena terjadinya perubahan luas wilayah karesidenan. Terjadinya perubahan wilayah ini tidak terlepas dari kepentingan perkembangan pengembangan wilayah maupun administrasinya, yang sampai sekarang pun perubahan semacam ini masih juga terjadi.

Dari segi geografi, studi tentang kota dan desa adalah penting dan menarik, karena dalam disiplin ini diperhatikan mengenai hal ihwal kota, kedudukan kota, hubungan kota dengan daerah sekitarnya (*location, site and situation*). Sistem *zonning* dan perubahan-perubahan yang timbul, perkembangan kota beserta masalah-masalah yang dihadapinya.[25]

Kota Semarang sebagai satu-satunya kota terbesar di Karesidenan Semarang, bahkan terbesar di Ja-

---

[25] Bintarto, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

wa tengah, juga mengalami perubahan, khususnya yang berkaitan dengan tata guna tanah. Di sebelah timur dan sebelah barat kota, pada abad ke-19 masih banyak diketemukan tambak-tambak ikan dan areal persawahan. Sehingga kota Semarang juga ada penduduk yang bermata pencaharian yang menurut Mc Gee disebut "petani kota".[26] Kota karesidenan dan kota kabupaten, merupakan kota yang memiliki gaya yang lebih khas. Kekhasan kota Semarang, seperti juga kota-kota setingkat lainnya, yakni sebagai kota karesidenan sedikit diwarnai dengan sifat Eropa karena adanya tempat tinggal Residen dan pejabat Belanda lainnya, sedangkan kabupaten lebih bersifat pribumi. Namun kota kabupaten memiliki gaya hidup sendiri, yaitu gaya hidup "priyayi". Gaya hidup priyayi ini terbawa dari penampilan gaya hidup para bupati yang pada waktu itu menempati kedudukan sebagai golongan pangereh praja, suatu kelompok pejabat pemerintah Belanda yang umumnya terpelajar dan masih diakui lambang-lambang status aristokratnya.[27] Semarang sebagai kota pusat perdagangan dan administrasi Hindia Belanda, telah tumbuh dan memiliki ciri baru, yaitu sebagai kota yang bercorak kolonial.[28]

---

[26] Chris Manning dan Tadjuddin Nor Efenfi (Eds.), *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1985, hlm. 2.

[27] Djoko Suryo, 'Kota-Kota di Jawa pada Abad 17-19', dalam: Soedarsono, Djoko Soekiman dan Retno Astuti (Eds.), *Peranan Kebudayaan Daerah dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional*, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1985, hlm. 36-37.

[28] *Ibid*., hlm. 32.

2.3 Penduduk dan Pemerintahan Desa

Dalam mempelajari masyarakat kota dan desa dari sudut penduduk, menurut Hsiao-tung Fei, titik berat haruslah tidak pada jumlah ataupun kepadatan penduduk, melainkan pada penyebarannya. Kita maklum bahwa dengan berkembangnya kehidupan ekonomi, penduduk mulai memusat pada tempat-tempat tertentu yang tak ubahnya semacam inti ataupun sel-sel. Pusat konsentrasi penduduk di suatu wilayah bisa disebut kota. Dengan sendirinya akan terdapat perbedaan kepadatan penduduk sehubungan dengan proses pemusatan inti, dan dalam wilayah sekelilingnya. Namun kita tidak bisa memungut begitu saja jumlah penduduk permil persegi sebagai dasar untuk membedakan kumpulan penduduk pada tingkat-tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Mengenai suatu kepadatan penduduk yang tinggi, persoalan pokoknya adalah mengnalisa mengapa penduduk terkonsentrasi pada beberapa tempat saja.[29]

Ditinjau dari persebaran penduduknya, maka Jawa termasuk pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, bila dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya.[30] Di Jawa, penduduk lebih terpusat di

---

[29] Hsiao-Tung Fei, 'Desa dan Macam-Macam Kota' dalam: Sartono Kartodirdjo (Ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 144.

[30] Dalam mengembangkan argument ekologisnya, Geertz membagi Indonesia ke dalam dua wilayah geografis, yakni "Indonesia Dalam" yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Laut, Bali Selatan, dan Lombok Barat, dan "Indonesia Luar" yang terdiri dari pulau-pulau luar Jawa lainnya termasuk Jawa Barat Daya. Kedua bagian ini jelas berbeda dilihat dari kepadatan penduduk (padat pada yang berbeda dilihat dari kepadatan penduduk (padat pada yang pertama dan renggang pada yang kedua). Lihat Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983, jlm. 12.

daerah dataran rendah, dan terus berkembang, sampai memuncak dua kali. Antara tahun 1800-1850, dari 6 juta meningkat menjadi 12,5 juta, dan meningkat lagi sampai 2,5 kali lipat pada paroh akhir abad ke-19.[31] jumlah penduduk di Jawa pada akhir tahun 1872 ada 17.291.200 orang. Jika dikurangi dengan penduduk bangsa Eropa dan Timur Asing, maka penduduk pribumi tinggal 17.061.484 orang. Jumlah ini termasuk Madura dan pulau-pulau kecil lainnya, yang dengan pulau Jawa seluruhnya meliputi 2.388,3 mil persegi. Apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka penduduk pribumi pulau Jawa dan Madura berjumlah 7.144 tiap mil persegi, atau 5.506,3 hektar. Jumlah ini tiap tahunnya bertambah besar, dalam tahun 1880 ada 8.182, tahun 1890 ada 9.885, dan tahun 1900 ada 11.884 orang.[32]

Jumlah penduduk yang besar, nampaknya pada saat itu justru merupakan suatu hal yang sangat didambakan. Dalam *Wulang Rajaputra*, karya raja Paku Buwana IX (1861-1893) yang ditulis tahun 1883, antara lain disebutkan: "... kesejahteraan desa terikat kepada kepadatan penduduknya".[33] Dari ajaran semacam inilah nampaknya yang kemudian melahirkan prinsip hidup "banyak anak banyak rezeki" di kalangan masyarakat Jawa, sehingga keluarga Jawa pada umumnya

---

[31] Jan G.L. Palto, 'Pertanian Lahan Kering di Jawa: Asal Usul dan Perkembangannya', dalam: *Agro Ekonomika*, No. 23. Tahun XVI, Desember 1985, hlm. 100.

[32] P.J. Veth, Java III, *Op. Cit*., hlm.3.

[33] Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java: A Study of Later Mataram Period, 16th to 19th Century,* Monograph Series, Modern Indonesia Project South East Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New York, 1963, Reprinted 1974, hlm. 36.

merupakan keluarga ”besar” yang terdiri dari beberapa orang.

Dalam jumlah penduduk seringkali terdapt perbedaan mengenai jumlahnya. Hal ini terjadi, karena pada waktu itu sistem pencatatan (sensus) penduduk belum dikelola baik seperti sekarang. De Waal memperhitungkan bahwa pada tahun 1850, 1860, dan 1875 jumlah penduduk lebih besar dari anghka resmi yang ada. Angka resmi tahun 1850, 1860, dan 1875 masing-masing 9.000.000, 12.000.000, dan 18.000.000. Padahal menurut De waal, angka tersebut untuk tahun-tahun yang sama adalah 12.000.000, 15.000.000 dan 20.000.000 jiwa. Juga angka yang dikemukakan Rafless diragukan kebenarannya. Baud memperkirakan pada tahun 1816 jumlah penduduk kira-kira 8.000.000 jiwa, tetapi angka ini terlalu tinggi , sedangkan angka perkiraan Rafless terlalu rendah.[34]

Di Karesidenan Semarang, jumlah penduduk dari tahun 1820-1823 tercatat sebagai berikut: tahun 1820 ada 199.281 jiwa, dan tahun 1823 berjumlah 256.641 jiwa. Sedangkan jumlah angka kematian pada 4 tahun tersebut berturut-turut sebagai berikut: 10.900 jiwa, 45.283 jiwa, 13.444 jiwa, dan 9.745 jiwa. Jumlah angka kematian yang tinggi ini, antara lain disebabkan oleh berjangkitnya kolera.[35]

Sebagai salah satu negara agraris tradisional, banyaknya jumlah penduduk sangat penting artinya bagi kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan penguasa. Sehingga dalam penghitungan

---

[34] Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (Eds.), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 27.

[35] Djoko Suryo, Thesis ... Op. Cit,., hlm. 4. Karesidenan Semarang pada tahun-tahun tersebut meliputi kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, dan Grobogan.

jumlah penduduk, sering terjadi pengurangan jumlah dari keadaan yang sebenarnya. Menurut Veth, suku bangsa Jawa sebenarnya jauh dari apa yang diperkirakan, dibanding dengan luas wilayahnya. Jumlah yang dinyatakan oleh Valentijn untuk pulau Jawa saja ada "tiga puluh satu juta anam puluh ribu dua ratus lima puluh jiwa", tentunya merupakan kekeliruan, karena menuruth Veth, angka terakhir dari keenam *bestek* setelah dijumlah ada 2.951.750 jiwa. Pada tahun 1781, Redemacher menaksir penduduk di Jawa ada 2.129.915 jiwa, dalam tahun 1795 Nedeburgh menaksir antara 3.500.000 jiwa.[36]

Manipulasi jumlah penduduk ini diperkirakan ada kaitannya dengan pengerahan tenaga kerja. Baik penguasa-penguasa "pribumi" maupun penguasa bangsa Belanda, keduanya sangat memerlukan tenaga kerja, maupun pemungutan pajak. Sesuai dengan tradisi pemerintahan pribumi, penguasa memungut pajak kepada rakyat dalam bentuk hasil bumi, maupun kerja wajib. Sedangkan penguasa Belanda berkepentingan dengan banyaknya penduduk, untuk dipekerjakan di perkebunan, pembuatan jalan dan jembatan bagi keuntungannya. Kekayaan penguasa pribumi (golongan *priyayi*) berpengaruh atas kedudukan serta penguasaan tanah para pengikutnya atau petani *cacah*nya. Semakin banyak *cacah* yang bergantung hidup kepadanya, semakin besar kekuasaannya, sekaligus semakin luas tanah yang akan memberikan penghasilan kepadanya. Hubungan antara golongan *priyayi* dengan *cacah*nya menurut istilah Jawa, digambarkan sebagai hubungan antara *Kawula-Gusti* (hamba dan tuan). Me-

---

[36] P.J. Veth . *Java: Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, Cetakan II, Jilid IV, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912, hlm. 6-8.

nurut istilah "modern", *Kawula-Gusti* itu diterjemahkan dengan "pelindung-anak buah" (*patron-client*).[37]

Hubungan antara rakyat dengan penguasa (pemimpin) daerahnya, terselenggara dalam ikatan feodal. Ikatan feodal, menurut Burger, dapat juga disebut perabdian feodal, yang senata-mata terdiri dari ikatan vertikal dan tidak mengandung ikatan persaudaraan (hubungan komunal). Sebagai kelanjutan dari perabdian feodal ini, di desa terdapat perabdian penduduk desa kepada kepala desa (unsur ikatan vertikal dari desa). Ikatan feodal adalah hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan-kekuasaan raja-raja dan bupati-bupati, termasuk juga kepala-kepala (desa) yang termasuk dalam lingkungan raja-raja serta bupati-bupati atau setidak-tidaknya lebih atas dari pada lingkungan desâ[8]. Namun, karena kepala-kepala desa merupakan penguasa tunggal di desanya, tidak jarang kedudukan kepala desa ini seakan "raja kecil" yang memiliki kekuasaan besar.

Penduduk adalah tenaga kerja. Barangsiapa memiliki atau menguasai banyak penduduk, berarti memiliki tenaga kerja yang banyak. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin murah tenaga kerja itu. Semakin murahnya tenaga kerja sudah barang tentu akan sangat menguntungkan para penguasa atau orang yang mempekerjakannya. Dalam kaitan dengan masalah kependudukan ini, dari data yang ditemukan menunjukkan dengan jelas bahwa pada paruh pertama

---

[37] Onghokham, 'Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pengusaan Tanah, dalam: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.), *Dua Abad Pengusaan Tanah: Pola Pengusaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa,* Jakarta: P.T. Gramedia, 1984. hlm. 10.

[38] D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosioligis Indonesia, Jilid I, Cetakan III, Jakarta: Pradnyaparamita, 1962, hlm. 95.

abad ke-19, di Semarang terdapat pertambahan penduduk yang sangat dramatik. Hal ini dapat dilihat jelas khususnya dalam tahun 1837-1875, angka penyebaran pertambahan penduduk terjadi di empat kebupaten dan kawedanaan. Percepatan pertumbuhan tahunan penduduk di seluruh karesidenan tampak meningkat, dari 2,5% menjadi 8,3%, tetapi penyebaran penduduk se-karesidenan tidak tetap[39] (lihat tabel II).

Tabel II
Angka Tahunan Pertumbuhan Penduduk dan Penyebarannya se-Karesidenan Semarang dari Tahun 1837-1845, dalam Kabupaten atau Kawedanan

Kabupaten atau Kawedanan	% Angka Pertumbuhan Tahunan dalam tahun 1837 -1845	% Jumlah Penduduk se-Karesidenan Semarang Tahun 1837	% Jumlah Penduduk se-Karesidenan Tahun 1845
Demak	8,5	25,2	30,6
Semarang	7,5	17,8	20,6
Grobogan	4,2	14,5	13,1
Kendal	4,0	19,5	17,4
Salatiga	2,5	23,0	18,3

Sumber: Djoko Suryo, Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in the Later 19th Century, Tesis Doktor pada Monash University, December 1982, hlm. 3.

Menurut Daldjoeni, ”makin besar pertambahan penduduk, makin menjadi jelas corak kekotaan suatu tempat”. Meningkatnya jumlah penduduk di kota Se-

[39] Djoko Suryo, Tesis . . . *Op. Cit*., hlm.2.

marang tidak semata-mata disebabkan bertambahnya jumlah angka kelahiran, tetapi juga bisa disebabkan meningkatnya angka urbanisasi dari daerah pinggiran atau pedesaan ke kota Semarang. Menurut Daldjoeni, pertambahan penduduk adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Sedangkan faktor lainnya, adalah kemajuan teknik perkembangan adalah suatu pertumbuhan yang menjadikan masyarakat selalu berubah. Proses ini tidak mengandung hukum-hukum yang ketat, karena itu perubahan tidak semudah diramalkan.[40]

Selain penduduk pribumi, di kota-kota besar seperti Semarang, berdiam pula orang-orang Eropa, Cina, Timur Asing lainnya (Arab, India dan lain-lain). Mengenai orang-orang Eropa di Semarang, jumlahnya semakin menurun. Pada tahun 1890, masih ada sekitar 200 jiwa. Pada tahun 1900 hanya tinggal 100 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 1900 seluruhnya diperkirakan 10.000 orang.[41] Adapun jumlah Cina di kota Semarang relatif cukup banyak, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di pulau Jawa. Menurut catatan dalam *Regering Almanak* tahun 1906-0910, di kota Semarang terdapat 13.636 orang. Pada waktu itu penduduk kota Semarang berjumlah 96.000 orang, atau 14,11% Cina dari seluruh jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, di Jakarta 20,31% dari seluruh penduduk, Surakarta 5,5%, Yogyakarta 6,61%, Surabaya 2,02%, Bandung 7,8%. Menurut sensus tahun 1920, terdapat 19.727 orang Cina di kota Semarang dari seluruh penduduk 126.628 atau 15,58%. Dalam sensus tahun 1930, terdapat 27.423 orang Cina, dari seluruh penduduk sebesar 175.457 orang atau 12,59%. Kenaik-

---

[40] Daldjoeni, Op. Cit., hlm. 17.

[41] P.J. Veth, Java III . . . Op. Cit, hlm. 471-472.

an terbesar terjadi pada tahun 1920, dengan datangnya imigran baru daru Cina.[42]

Di kota Semarang ditempatkan seorang berpangkat *mayor* dibantu oleh satu atau dua orang *kapten* dan empat atau lebih *letnan*; sedangkan untuk setiap distrik ditempatkan seorang kepala distrik. Di tempat lain selain Semarang, meskipun ditempati oleh lebih banyak orang Cina, hanya ditempatkankan *kapten* saja. Ini hanya berlaku untuk kota-kota wilayah. Di tempat lain yang penduduk Cinanya lebih sedikit, ditempatkan seorang *letnan*. Bagi wilayah yang lebih kecil, hanya ditempatkan seorang kepala distrik. Seorang perwira Cina tidak diperkenankan untuk menghukum atau mendenda, akan tetapi para pelanggar akan diadili oleh pegawai-pegawai bangsa Eropa yang mempunyai wewenang. Pemungutan pajak dari perusahaan-perusahaan milik orang Cina itu ditugaskan kepada para perwira-perwiranya (*opsir-opsir*nya), dimana mereka itu memperoleh 8% dari pajak yang mereka pungut.[43]

Wilayah-wilayah yang didiami orang-orang Arab di Jawa, terutama adalah Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Gresik, Surabaya, Ba-ngil dan Banyuwangi. Mereka tidak diperbolehkan bertempat tinggal di daerah pedalaman. Sampai ada peninjauan lebih lanjut, untuk sementara waktu di daerah-daerah terpencil oleh pemerintah dipersukar. Keterbatasan gerak dan keharusan tinggal bersama di tempat-tempat yang telah ditentukan bagi bangsa

---

[42] Hartono Kasmadi dan Wiyono (Eds.), *Op. Cit*., hlm. 82-83.

[43] P.J. Veth, Java IV . . . *Op. Cit*., hlm. 118.

Arab, menimbulkan kejengkelan selama bertahun-tahun.[44]

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang dan Kendal pada akhir tahun 1929 seluruhnya 996.846 jiwa, dengan perincian: 16.982 jiwa orang Eropa, 29.591 jiwa Cina, 2.200 jiwa Timur Asing lainnya, dan 48.043 jiwa golongan pribumi. Perincian jumlah penduduk per distrik, per kabupaten dan khusus untuk Kotapraja Semarang dan Salatiga dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel III
Perincian Jumlah Penduduk per distrik di Kabupaten Semarang dan Kendal pada tahun 1929

Distrik	Jumlah Penduduk	Bangsa Eropa	Timur Asing
Semarang	154.785	13.333	26.174
Salatiga	139.138	1.639	1.898
Tengaran	107.463	34	73
Ambarawa	107.312	612	1.378
Ungaran	86.222	499	552
Kabupaten Semarang	594.920	16.117	29.975
Kendal	78.721	100	410
Kaliwungu	68.570	175	395
Boja	67.425	160	200
Selokaton	61.346	200	191
Weleri	125.831	230	620
Kabupaten Kendal	401.896	865	1.816

[44] *Ibid*., hlm. 126.

Sumber: Memori Residen Semarang (P.J. Bijleveld), 2 Juni 1930, dalam *Memori Sejarah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta: 1977, hlm. 43.

Penduduk pribumi di daerah Semarang hampir semuanya berbahasa Jawa asli, dengan pengecualian beberapa dialek. Penduduk golongan Eropa bertempat tinggal terutama di kota-kota, di pabrik-pabrik dan di perkebunan-perkebunan. Penduduk golongan Cina, tempat tinggalnya terutama, baik kota besar maupun kota kecil. Sedangkan orang-orang Arab dan India, kebanyakan bertempat tinggal di kota Semarang.[45]

Mutasi penduduk banyak terjadi di lingkungan kuli perusahaan di kota Semarang, seperti di pelabuhan, perusahaan perkapalan dan pabrik-pabrik. Keadaan ini dapat dimengerti, sebab kuli-kuli itu biasanya berasal dari luar kota Semarang. Mereka ada yang berasal dari Demak, Jepara, Surakarta, Kedu, Yogyakarta, dan Bagelen. Mereka hanya untuk sementara bertempat tinggal di kota Semarang, yaitu selama bekerja sampai dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk dibawa pulang ke tempat asalnya. Mutasi semacam ini, terjadi juga di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik-pabrik gula. Di lingkungan petani, boleh dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi mutasi, karena mereka terikat oleh tanah usanya.[46]

Tahun 1929, penduduk Kotapraja Semarang berjumlah 154.785 orang, terdiri dari 13.333 orang Eropa, 115.278 orang pribumi, 23.974 orang Cina, dan 2.200 Timur Asing lainnya. Sedangkan jumlah penduduk Salatiga sebanyak 19.192 orang, terdiri dari 1.502 orang Eropa, 15.908 orang pribumi, 1.665 orang

---

[45] Memori Residen Semarang, *Op. Cit*, hlm. XXXVI.
[46] Ibid, hlm. XXXVI-XXXVII

Cina, dan 117 orang Timur Asing lainnya.[47] Sebagian besar penduduk Karesidenan Semarang, seperti halnya penduduk di negara agraris lainnya, mereka tinggal di pedesaan dan hidup sebagai petani. Desa-desa di daerah Semarang menunjukkan suatu tipe rumah tangga Jawa, yaitu mulai tumbuh menjadi rumah tangga uang yang murni, terutama di desa-desa di kota atau yang berdekatan dengan kota. Sifat kedesaannya dan lembaga-lembaga adatnya mulai luntur. Kepala-kepala desa di daerah Semarang mutunya tidak kalah dengan daerah lain.[48] Anggota pemerintahan desanya pada umumnya cukup baik. Mereka berasal dari warga desa yang ditunjuk oleh kepala desa dengan persetujuan warga desa dan disahkan oleh kepala *distrik*.[49]

Pada waktu pemerintahan Raffles sampai van den Bosch, pengaruh ketatanegaraan Barat memang meresap jauh kedalam pergaulan hidup masyarakat Jawa, dengan penempatan "pemerintahan Eropa" di atas organisasi feodal Jawa. Sehingga ikatan feodal kuno itu agak modern, sekalipun demikian, pengaruh itu tidak sampai kepada orang desa.[50] Baru pada waktu Deandels memegang pemerintahan, Kumpeni mengambil suatu kebijakan untuk mengatur penduduk pribumi oleh para pemimpin sendiri (kepala desa), dan

---

[47] Memori Residen Semarang (P.J. Bijleveld), 2 Juni 1930, dalam: Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah), Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta: 1977, hlm. 44.

[48] Pamong desa pada akhir abad ke-19 kualitasnya sangat menyedihkan. Menurut data statistik yang kemudian dirinci lagi oleh Holle, maka dari 32.000 kepala desa, yang dapat menulis huruf Latin 7%. Dari 31.000 *Carik* Desa, 92% dapat menulis huruf Jawa, 18% dapat menulis huruf Latin. Lihat Soedjito Sosrodiharjo, *Perubahan Struktur Masyarakat Jawa*: Suatu Analisa, Yogyakarta: Penerbit Karya, 1968, hlm. 80-81.

[49] Memori Residen Semarang, *Op. Cit*, hlm. XXXVIII.

[50] D.H. Burger, Sejarah Ekonomis . . . Op. Cit, hlm. 157.

kepentingan para pemimpin ini dikaitkan dengan kepentingan mereka sendiri. Keadaan rakyat kecil dalam segala hal, boleh dikatakan sengsara. Mereka tunduk tanpa mengeluh apa yang ditugaskan kepadanya dan hasil pertanian yang diwajibkan secara teratur diserahkan, sekalipun kopi, gula dan lada meluas ditanam di pantai utara maupun pantai timur.[51]

Gubernur Jenderal Deandels mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan keras, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Ia memberikan gaji tetap kepada para pegawai negeri, melarang mereka menerima hadiah-hadiah dan melarang melakukan perdagangan.[52] Peraturan-peraturan Deandels memerlukan lebih banyak perhatian dan pengawasan oleh orang-orang Eropa di daerah-daerah pedalaman. Keadaan tersebut, dan karena pemerintahan Deandels bekerja secara sentralistis, agaknya menyebabkan pengaruh Eropa pada waktu itu semakin mendalam.[53]

Kebebasan formal dari para kepala terus dikurangi. Dalam tahun 1870, pernah, tanah jabatan para kepala dihapuskan dan para pekerja-pekerja wajib untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah-rumah dan keraton (*pancen*) yang boleh dipergunakan oleh tiap kepala itu, ditetapkan banyaknya. Bupati misalnya, sehari hanya diberi 40 orang *pancen*. Menuntut jasa-jasa atau penyerahan-penyerahan dari rakyat untuk membuat atau memelihara rumah-rumah para pegawai, dilarang. Kepala-kepala yang melakukan penganiayaan dihukum. Gagi-gaji dinaikkan. Dalam tahun 1874 pegawai yang tak punya *pancen* lagi, dan dalam tahun 1882 pekerjaan-pekerjaan wajib itu dihapuskan sama sekali.

---

[51] P.J. Veth, Java II . . . *Op. Cit*., hlm. 255-256.
[52] D.H. Burger, Sejarah Ekonomis . . . *Op. Cit*, hlm. 125.
[53] *Ibid*., hlm. 126-127.

Dengan segala tindakan ini, maka hak-hak feodal para kepala dihapuskan.[54]

Usaha lain untuk mencampuri rumah tangga desa ialah, diadakannya lembaga yang disebut "*dessa klatchen*" atau gugatan desa. Kepada penduduk diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap *lurah*nya sendiri, kepada pejabat pangereh praja Belanda yang selalu datang ke desa. Hal ini mempermudah pengawasan Belanda terhadap *lurah*, dengan melalui rakyatnya sendiri. Secara tidak langsung memberikan kesempatan juga kepada pihak-pihak tertentu, yaitu *pokrol-pokrol bambu* dan pembuat surat-surat permohonan di desa (karena pada waktu itu yang dapat menulis huruf Latin masih sedikit), untuk memeras rakyat. Pokrol-pokrol dan tukang pembua permohonan (*rekes*) ini dapat saja membakar rakyat untuk mengadukan *lurah*nya, kepada Belanda dan dengan demikian mendapat penghasilan dari mengajukan gugatan.[55]

Nama anggota pemerintahan desa di daerah Semarang pada umumnya sebagai berikut:

Sarekat Desa	: pemerintahan desa, yaitu kepala desa beserta pembantu-pembantunya
Lurah	: kepala desa
Carik	: juru tulis desa
Kamituwo (Bekel)	: wakil atau pengganti lurah
Kepetengan (Sentono)	: polisi desa
Kebayan	: pesuruh desa
Modin	: kaum / ulama.[56]

---

[54] *Ibid*., hlm. 210.

[55] Soedjito Sosrodihardjo, *Op. Cit*., hlm. 79.

[56] Memori Residen Semarang, Op. Cit., hlm. XXXVIII. Lihat pula Hiroyashi Kano, 'Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah',

Di Jepara dan Rembang, kepala desa disebut petinggi. Adapun struktur organisasi desa di daerah Pati, adalah sebagai berikut: *Petinggi, Kamituwa, Carik, Kepetengan, Kebayan, Modin, Merbot*.[57]

Susunan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kelas-kelas pemasaran Belanda. Ukuran atau Norma yang digunakan dalam mengadakan perubahan ini di dalam susunan pemerintahan desa selalu berhubungan erat dengan kepentingan pengusaha-pengusaha Belanda. Politik yang dianut adalah, menghormati hukum adat. Akan tetapi di dalam kenyataanya, dari hukum adat ini yang diambil hanya bentuk luarnya saja, sedangkan isinya sudah diganti dengan kepentingan lain, yaitu kepentingan Belanda. Pemerintahan desa berdasarkan kepada hukum adat, tetapi jika kepentingan Belanda membutuhkannya, maka yang dipertahankannya hanya yang tidak menimbulkan kebingungan rakyat yang bersangkutan. Dengan sistem inilah Belanda dapat mempertahankan diri. Dengan cara ini, Rafless (Inggris) maupun Deandels (Belanda) mempunyai tujuan yang sama, yakni menjadikan para *bupati* sebagai pegawai yang dilepaskan dari kekuasaan politiknya. Akan tetapi sistem Rafless lebih kasar, para *bupati* akan disingkirkan begitu saja. Sedangkan Belanda membiarkan para *bupati* secara formal sebagai kepala daerah sehingga adatnya tidak terganggu. Akan tetapi dalam waktu yang sama memutuskan hubungan feodal antara *bupati* dengan rakyatnya dengan cara mencabut tanah *lungguh* para *bupati*. Sesungguhnya

---

dalam: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.), *Op. Cit*., hlm. 37.

[57] DH. Burger, 'Desa Ngablak (Kabupaten Pati) pada Tahun 1869-1929', dalam: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.), Op. Cit ., hlm. 87.

penggantian semacam ini masih sama dengan sistem feodal yang lama, tetapi isinya sudah berbeda, yaitu feodalisme kolonial.[58]

Jabatan *residen* ke atas, dijabat oleh orang-orang Belanda. Di bawahnya, ada asisten *residen* yang mendampingi bupati-bupati bangsa Indonesia. Di bawahnya lagi khusus abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 masih ada pegawai-pegawai *pangereh praja* Belanda yang disebut *kontelir* atau *controleur Binenland Bestuur* (BB), yang pekerjaannya mengawasi pekerjaan di bawah sampai ke desa. *Bupati* mempunyai bawahan sendiri sampai *wedana*, tetapi bawahan ini selalu dikesampingkan oleh pegawai bangsa Belanda dan tidak banyak diminta pertimbangannya.[59]

Untuk membiayai pembangunan di desanya, pada waktu itu kas desa mulai dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha dan bangunan-bangunan desa, yang ditunjuk untuk kepentingan umum. Jumlahnya pada umumnya cukup banyak dan saldonya disimpan di Bank Kredit Rakyat. Uang kas desa ini diperoleh dari pungutan di pasar-pasar desa, keuntungan Bank Desa, hasil desa atau dari sumber lain yang menjadi milik desa. Uang kas ini penggunaannya diawasi oleh *pengereh praja* setempat.[60]

---

[58] Soedjito Sosrodihardjo, Op. Cit., hlm. 84.
[59] Ibid., hlm. 80.
[60] Memori Residen Semarang, Op. Cit., hlm. XL.

BAB III

PENGUSAAN TANAH DAN KETENAGAKERJAAN DI KARESIDENAN SEMARANG

3.1 Matapencaharian Penduduk

Mayoritas penduduk Karesidenan Semarang bisa dikatakan memiliki matapencaharian hidup di sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari kondisi umum pekarangan penduduk yang banyak ditumbuhi tanaman, baik tanaman keras maupun tanaman pangan. Untuk mengelola tanah-tanah pekarangannya, digunakan tenaga kerja di lingkungan keluarga sendiri. Tenaga kerja di luar keluarga hanya digunakan apabila tenaga kerja di lingkungan keluarga tidak mencukupi. Ber-hubung sistem ekonomi uang belum dikenal tenaga kerja di lingkungan keluarga ini tidak diberi upah

dan mereka bekerja dalam kerangka saling tolong-menolong.

Ekonomi swasembada tersebut bukan saja menyebabkan mobilitas sosial mereka rendah, tetapi juga keadaan ekonomi yang rendah. Perdagangan hampir tidak bisa dikatakan belum meluas, dan hanya dikerjakan di kota-kota besar saja. Mereka berswasembada pangan, sandang, dan juga kebutuhan hidup lainnya. Dalam ekonomi rumahtangga yang memenuhi kebutuhan sendiri, baik masyarakat yang masih berpindah-pindah (nomadik) maupun agraris, tiap unit bisa hidup sendiri dan mungkin penduduknya tersebar di seluruh wilayah. Tidak ada alasan ekonomis untuk memusat ke suatu tempat, dan sekalipun orang-orang ini berkumpul, di sini tidak terdapat perbedaan ekonomi. Dalam bercocok tanam, tidak sedikit petani yang memilih tinggal menetap di atas tanah pertaniannya sendiri, agar dekat dengan tempat bekerja serta mudah memetik hasilnya.[1]

Menurut Thorner, dalam ekonomi tani, kira-kira separuh dari penduduk total terlibat dalam pertanian, dan lebih dari separuh angkatan kerja harus bekerja dalam usaha pertanian. Singkatnya, bahwa untuk disebut 'petani', suatu sistem pertanian terutama harus bersifat pertanian. Dalam negara kapitalis atau sosialis yang sudah mempunyai industri, mungkin masih tersisa beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta petani, namun kita tak akan menemukan istilah 'petani' pada

---

[1] Tipe pertanian ini oleh Hsiao-tung Fei disebut dengan tipe pertanian terpencar, yang umumnya terdapat di Amerika. Lihat Hsiao-tung Fei "*Desa dan Macam-Macam Kota*" dalam Sartono Kartodirjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.145.

perekonomian semacam itu, bila dipandang secara keseluruhan.[2]

Dalam ekologi sosial, masyarakat digolongkan atas empat (golongan) fungsi:

1. berfungsi memberi jasa: pertanian, perikanan, pertambangan;
2. berfungsi distribusi melalui perdagangan dan pemasaran;
3. berfungsi industri;
4. berfungsi industri pusat, politik dan pertanahan.[3]

Maka sesuai dengan ekologi sosial ini, penduduk pedesaan di Karesidenan Semarang dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok pertama, yakni pemberi jasa pertanian, perikanan dan pertambangan. Sedangkan penduduk perkotaan dapat digolongkan ke dalam golongan kedua, ketiga dan keempat.

Maksudnya pengaruh Barat (Belanda) ke Indonesia yang memiliki perbedaan di antara keduanya, pada mulanya tidak begitu banyak menimbulkan pertentangan. Artinya, perbedaan itu tidak cukup besar sehingga dapat disebut "dualisme" seperti yang dimaksud oleh Boeke, yaitu dua susunan sosial-ekonomi yang berjauhan sistemnya. Pergaulan masyarakat Jawa, dengan pedalaman yang bersifat pertanian dan feodal dan dengan perdagangan internasional di pesisir, telah mencapai suatu tingkat yang menurut pemikiran Wernersambert boleh disebut kapitalisme awal (*Ear-*

---

[2] Syein Aas, "Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Pengusaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984, hlm.113.

[3] Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Bandung*: Alumni, 1979. hlm. 29.

lier Capitalism).[4] Istilah kapitalisme (*capitalism*) ini bisa dikatakan memiliki kaitan erat dengan konsep *Free enterprise,* yaitu suatu situasi dimana di dalamnya setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan dalam berusaha.[5]

Pengubahan pedalaman Jawa yang hampir seluruhnya masih kuno dengan ekonomi yang berdasarkan feodalisme serta bertujuan mencukupi keperluan sendiri, adalah masalah utama bagi pemerintahan Eropa pada permulaan abad ke-19. jika Raffles, dengan mematahkan kekuasaan para bupati, memulai usahanya pada orang-orang terendah, yakni orang-orang termiskin yang akan tertarik dari desa-desa sebagai pekerja upah.[6]

Sebelum tahun 1800 kegiatan Belanda di Indonesia disesuaikan dengan pranata masyarakat Indonesia, setelah tahun 1800 orang-orang Belanda berusaha menyesuaikan masyarakat Indonesia dengan pendapat-pendapat Barat, dan meninjau kembali struktur pergaulan hidup Indonesia. Hal ini disebabkan karena perubahan status daripada orang-orang Belanda. Sebelum tahun 1800 mereka datang ke Indonesia untuk berdagang; sesudah tahun 1800 mereka mulai menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya.[7] Pengaruh Barat dengan demikian merupakan garis terus-menerus yang tiada terputus. Gerak maju ini selalu karena terpaksa, juga dan justru ketika

---

[4] D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1977. hlm.67.

[5] Fachry Ali, *Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Strukutural*, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 22-24.

[6] D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Terjemahan Prayudi, Jilid I, cetakan kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 162.

[7] *Ibid*, hlm. 125.

terjadi pergantian ”sistem” dan pengurusan oleh Kumpeni diganti dengan ”tata bumi”, kemudian dari ”tata bumi” ke ”sistem tanam paksa” dan sesudah itu ke politik kolonial modern. Dalam perubahan sistem itu, karena daerah-daerah pinggiran sosial yang belum berada di bawah pengaruh Barat, memerlukan penyediaan sarana demi efisiensi organisasi dalam ekspor, dalam produksi atau pemerintahan Maka kelemahan-kelemahan yang terungkapkan diperkokoh, dan pembinaan diteruskan atas dasar-dasar yang diletakkan pada masa sebelumnya.[8]

Ekonomi rumah tangga yang belum mengenal uang, menyebabkan penduduk tidak dapat meningkatkan taraf hidup secara kumulatif. Hidup secara paspasan, bahkan kekurangan, merupakan keadaan yang dapat ditemui dihampir seluruh kehidupan penduduk pedesaan (petani). Menurut Duverger, paham ”cara hidup”, yang merupakan dasar suatu konsep yang lain bagi kelas sosial, luar biasa kaburnya. Ungkapan tersebut menunjukkan seluruh jaringan (kompleks) perilaku, kebiasaan, tradisi dan mentalitas dengan mana suatu kategori sosial dibedakan dari yang lain. Pekerja-pekerja pertanian merupakan contoh terbaik bagi suatu kelas dibatasi oleh cara hidupnya. Posisinya dalam hubungan dengan milik pribadi bersifat sekunder di sini: petani, pekerja-pekerja pertanian, pengolah, petani penyewa, bahkan buruh tani (dengan sedikit pamrih) memiliki cara hidup sama. Di samping pemilik tanah yangbesar (bukan petani dan tidak terlibat di dalam pekerjaan pertanian sendiri), perbedaan penda-

---

[8] D.H. Burger, Perubahan ... *Op.cit*., hlm. 23.

patan tidak merubah kenyataan bahwa semua yang bekerja atas tanah mempunyai cara hidup yang sama.[9]

Akan tetapi, di bawah tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat dan sumber daya yang terbatas itu, menurut Geertz, masyarakat desa Jawa tidak terbelah menjadi dua, seperti yang terjadi di banyak negara "belum berkembang", melainkan tetap mempertahankan homogenitas sosial dan ekonomis yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagikan rezeki yang ada; hingga makin lama makin sedikit yang dite-rima oleh masing-masing anggota masyarakat, yaitu suatu proses yang dinamakan *share poverty* (kemis-kinan yang dibagi rata). Menurut pendapatnya, masya-rakat desa itu tidak terbagi atas golongan *have* dan *have nots*; melainkan dengan istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan petani (Jawa) golongan cukupan dan kekurangan.[10]

Menurut penafsiran para petani, ketidaksamaan ekonomi pada hakekatnya merupakan konsekuensi takdir Tuhan dan bukan merupakan konsekuensi ikhtiar manusia dalam memperebutkan sumber-sumber yang langka.[11] Adanya sikap pasrah atau "narima ing pandum" merupakan indikasi dari kurang sadarnya manusia desa akan tiga lingkungan yang menantangnya.[12]

---

[9] Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, disunting oleh Alfian, Jakarta: C.V. Rajawali, 1982, hlm. 213-214.

[10] Clifford Geertz, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983, hlm. 102.

[11] Moh. Amaluddin, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal-Jawa Tengah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 77.

[12] Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 32.

Kemiskinan petani Jawa bukan saja disebabkan oleh adanya sikap pasrah, tetapi ditunjang pula oleh adanya kesadaran dan kepercayaan yang tak tergoyahkan, akan nasib akan hal-hal yang telah ditakdirkan, yang dinyatakan dalam kata *pinesti* (ditentukan), *tinitah* (ditakdirkan), atau kata pinjaman dari bahasa Arab, takdir. Menurut kepercayaan para petani Jawa, ada dua lapisan utama dalam lapisan masyarakat Jawa: *wong cilik* (orang biasa) dan *penggede* (golongan penguasa). Kedua lapisan tersebut tidak semata-mata didasarkan atas kekayaan ekonomis atau keunggulan kelahiran, tetapi lebih dilihat dari segi pertuanan dan perhambaan atau segi *kawula* (hamba) dan *bendara* (tuan), dan tempat seseorang dalam masyarakat. Jadi hak dan kewajibannya, dianggap sebagai telah ditakdirkan. Tak dapat diragukan lagi bahwa anggapan atau keyakinan seperti itu banyak peranannya dalam melancarkan hubungan antar manu-sia.[13]

Kaum *abangan* adalah kaum petani Jawa, sedang *priyayi* kaum aristokratnya. Agama *abangan* mewakili sintese kaum petani atas unsur yang diterimanya dari kota dan warisan kesukuannya, suatu sinkretisme potongan-potongan tua dari selusin sumber yang disusun menjadi satu kesatuan besar untuk melayani kebutuhan rakyat yang bersahaja yang menanam padi di petak-[etak yang beririgasi. Sekarang ini ada petani

---

[13] Soemarsaid Martono, *state and statecraft in old java. A study of Later Mataram Period, 16th to 19th Century*, Monograph Series. Modern Indonesia South East Asia Program, department of Asian Studies. Cornell University, Ithaca New York, 1963. Reprinted 1974, hlm.19.

santri, karena kultur petani tua yang homogen itu kini mulai pecah karena tekanan-tekanan hidup modern.[14]

Dalam masyarakat Jawa, "kelas" berdasarkan pemilikan tanah dibedakan sebagai berikut :

I. Penduduk inti, pemilik pekarangan dan tanah garapan (*baku, sikep, gogol, kuli, wong kenceng*)

II. a. Pemilik pekarangan dan rumah (*lindung, angguran kampung*, atau kadang-kadang hanya dinamakan *kuli* atau sikep No. 2 atau *wong setengah kenceng*) ;

b. pemilik rumah diatas pekarangan orang lain (*wong dempel, menumpang, numpang karang*);

III. a. Para penghuni, orang-orang berkeluarga yang tinggal pada orang lain, seperti *tua-tua*, orang yang baru menikah, orang-orang baru (*rangkepan, kumpulan, nusup, kempitan*) ;

b. Para perjaka (*joko, sinoman*)[15]

bagi kaum petani, sikap itu berarti penguasa tanah; bagi kaum elit, mereka itu terutama berarti orang-orang yang bertanggungjawab untuk sumbangan dan kerja bakti.[16] Menurut tradisi, tiap keluarga di desa hanya mendapat tanah seluas mendapat yang dikerjakannya dengan cara-cara sederhana, yaitu seluas ku-

---

[14] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, hlm. 307.

[15] A.M.P.A. Schelteme, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Cetakan Pertama : Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985. hlm. 382.

[16] Ongokham, ' Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX, Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pengusaan Tanah' dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds). Op.cit, hlm. 9.

rang lebih 0,9 ha sampai 2 ha, untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Produksi sangat jarang ditingkatkan untuk mendapat keuntungan, padahal kepadatan penduduk semakin meningkat; sehingga kebutuhan akan lahan pertanian akan semakin tinggi. Pola ekologi agaknya sudah sangat umum di Jawa, jauh sebelum bangsa Belanda datang.

Orang-orang luar dan mereka ynag berkedudukan lebih rendah mungkin saja dapat memperoleh kedudukan yang lebih menguntungkan dalam hubungannya dengan tanah. Si pihak lain, orang luar mungkin dapat memperoleh hak atas tanah yang ditentukan dengan jelas setelah tinggal dalam suatu komunitas selama beberapa generasi. Namun setelah itupun hak mereka pada waktu krisis dengan mudah dikalahkan oleh hak kemunitas. Pada akhirnya, kepala desa (*lurah, bekel*) yang dibantu oleh sejumlah pembantu, mempunyai kekuasaan yang otoktratis. Yang hakiki ialah bahwa dalam setiap desa ada suatu kelompok sosial yang mempunyai hak lebih banyak daripada warga desa yang lain dalam hubungannya dengan tanah, namun masih belum merupakan kelas sosial yang bebas. Warga-warga berbeda satu sama lain lebih dalam hal kelimpahan daripada dalam kualitas miliknya. *Gogol* dan *lurah* merupakan kelangsungan pola 'Asia', dimana kesukuan (*clan*) dan milik komunal sebenarnya merupakan landasan, dimana hak-hak istimewa masyarakat berasal dari hubungan geneologis yang dekat dengan *cikal-bakal* desa dan, yang identik dengan hal itu, dengan roh-roh desa.[17]

---

[17] Svein Aas, Relevansi Teori Makro Chayanov untuk Kasus Pulau Jawa, dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), Op.cit, hal. 124-125.

Masuknya pengaruh Barat (Belanda) ke Indonesia telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan kepentingan perekonomian Belanda. Ekonomki feodal yang kuno dijadikan rumahtangga lalu-lintas modern. Rumahtangga desa yang amat tertutup sifatnya, telah terbuka untuk menerima berbagai pengaruh dari luar. Lalu-lintas uang telah dalam meresap ke rumahtangga hasil bumi yang kuno. Hasil bumi, tenaga dan tanah telah masuk ke dalam kegiatan perekonomiannya. Perubahan ekonomi ini disertai perubahan sosial. Beredarnya uang berarti berkembangnya kontrak. Kontrak itu sesuatu yang pribadi. Sekalipun kontrak itu sangat dipengaruhi oleh adat, namun keputusan pribadi dari pihak-pihak yang bersangkutan diperlukan pula. Maka bertambahnya peredaran uang, berarti proses individualisasi yang *dibarengi* dengan bertambah lemahnya hubungan-hubungan kemasyarakatan dan bertambah merdekanya individu.[18]

Lalu-lintas kontrak yang merupakan nama lain untuk lalu lintas uang, menurut Burger memang merupakan sesuatu yang baru dan di pedalaman disebabkan karena adanya pengaruh Barat. Lalu-lintas uang berasal dari masyarakat Barat yang strukturnya berlainan sama sekali dari struktur asli masyarakat Jawa asli. Dalam masyarkat Jawa satu setengah abad yang lampau, kehidupan ekonomi tidak diatur dengan perjanjian atau oleh kaum pengusaha. Kehidupan ekonomi di desa pada waktu itu diatur dengan tolong-menolong dan dengan gotong-royong dalam bentuk yang lain, yang berlandaskan kerukunan, ciri komunal dari desa, serta berdasarkan kepatuhan penduduk desa kepada kepala desa. Kerukunan dan kepatuhan ini ber-

---

[18] D.H. Burger, Perubahan ..., Op.cit., hlm. 158.

sama-sama merupakan ikatan desa. Kehidupan ekonomi pada tingkat di atas desa yang memenuhi kebutuhan raja, bangsawan dan ekspor, didasarkan atas pungutan barang dan jasa, jadi berdasarkan ikatan feodal penduduk kepada raja dan bangsawan. Ikatan desa dan feodal merupakan ikatan tradisonal masyarakat Jawa. Ikatan tradisonal inilah yang meresapi seluruh kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dari masyarakat Jawa sekitar tahun 1800. Pimpinan produksi bukan di tangan pengusaha, tetapi di tangan para kepala.[19]

Pada sekitar tahun 1800-an itu pula kemudian ada pandangan baru bahwa, dengan produksi secara feodal lama ekspor tidak mungkin naik lebih besar, dan bahwa tanah seharusnya dapat menghasilkan lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Kesejahteraan rakyat yang rendah dicari sebab-sebabnya dalam kefeodalan. Apabila kesewenangan, paksaan dan tekanan feodal dapat dihapuskan, keinginan rakyat untuk sejahtera diperkirakan akan mendapat kebebasan. Maka Dirk Van Hogendorp menganjurkan supaya masyarakat Jawa dihilangkan kefeodalannya. Menurut pendapatnya, kekuasaan bangsawan harus dibatasi, tirani dan korupsi harus diberantas, sedangkan kepastian hukum dan kemerdekaan pribadi serta harta perlu diberikan. Pendapat ini ditentang oleh kaum konservatif. Mereka mengemukakan betapa banyak pimpinan rakyat akan dirugikan dengan tindakan semacam ini dan mengkhawatirkan kalau hal itu akan mengakibatkan perang.[20]

Pada masa kekuasaan *Verenigde Oost-Indie Compagnie* (VOC), penduduk Cina hampir terdapat di setiap kota di Jawa. Orang-orang Cina tersebut telah

---

[19] Ibid, hlm. 23-24.
[20] Ibid, hlm. 10

bertindak sebagai pedagang perantara dalam hubungan dagang antara orang Belanda dengan penduduk pribumi. Mereka juga banyak mendirikan pabrik-pabrik gula bagi keperluan penduduk setempat dan untuk ekspor. Sebagian hasil guna juga digunakan untuk menghasilkan minuman keras (arak). Mereka juga membuat lilin dan minyak kacang. Di samping itu, orang-orang Cina menjadi penyewa-penyewa dari hak perpajakan yang disewakan kepada mereka, baik oleh VOC maipun penguasa-penguasa pribumi, seperti misalnya pajak impor dan ekspor, pajak pasar dan bea pasar, konsesi-konsesi perjudian, serta pajak pembuatan anggur dan perdagangan garam, beras dan kayu. Akibatnya, penduduk Cina semakin makmur dan bertambah jumlahnya, dan terdapat banyak imigran baru datang dari Cina; terutama setelah tahun 1644 ketika dinasti Ming digantikan oleh dinasti Manchu.[21]

Residensi Semarang merupakan daerah terpenting di Jawa Tengah Ibukotanya merupakan pelabuhan terpenting di bagian pulau ini. Selain dari hasil panen, penduduk juga menghasilkan katun, yang hanya terdapat di Afdeling Demak. Di Afdeling Jepara kekurangan air untuk tanaman padi mengakibatkan sawah mereka tergantung pada hujan; sehingga hasil panen dalam musim hujan yang sedikit produksinya menurun.[22] Di Karesidenan Semarang terdapat 39 tanah swasta diantaranya lebih dari 100 bau luasnya. Tanaman utama adalah padi dan buah kelapa. Jumlah tanah perkebunan di tanah erfpacht seluas 60 bau pada

---

[21] Kasmadi, Hartono dan Wiyono, *Sejarah Sosial Kota Semarang* (1900-1950), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985, hlm. 79-80.

[22] ENI III, hlm. 741.

umumnya ditanami kopi, dan juga sering ditanam bersama dengan kina, coklat, indigo, kapok, lada, pala dan rempah lainnya. *Ondernaming* di afdeling Ambarawa hanya ditanam kina. Di beberapa *erfpacht-perceelen* hanya ditanam padi, gula dan tanaman kedua. Diantara tanah onderneming yang membuat perjanjian dengan penduduk terdapat 12 pabrik gula, 1 pabrik tapioka, 2 penggilingan padi, dan 4 onderneming bagi tanaman gula/tebu sebagai tanaman material. Selanjutnya 5 pabrik karet pemerintah, yang mengolah getah dari perkebunan pemerintah.[23]

Di Hindia Belanda, tradisi perdagangan beras berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terutama dari daerah lumbung padi pada jaman lampau dengan pelabuhannya di Jepara dan Demak; bahkan sebelum tanaman padi meluas di Jawa. Sejumlah beras dikirim ke berbagai di bagian timur Indonesia (Hindia Belanda) untuk ditukar dengan rempah-rempah. Van Leur memperkirakan perdagangan Jawa sekitar 30.000 ton setahun. Daerah-daerah sekitarnya juga menggantungkan diri pada persediaan beras ini, bahkan sampai diperdagangkan ke Selat Malaka.[24]

Menurut, Geertz penanaman padi di Jawa sudah sampai tingkat optimal, karena elastisitas ekologi dari persawahan itu tidak mungkin dipertinggi lagi, maka

---

[23] Ibid, 12 pabrik gula yang disebut diatas, termasuk pabrik gula di Karesidenan Jepara. Pabrik gula di Karesidenan Semarang hanya 4 buah, yang semuanya terdapat di afdeling Kendal. Pabrik gula di Karesidenan Jepara dimasukkan ke dalam Karesidenan Semarang, disebabkan pada akhir abad XIX, Jepara termasuk wilayah Karesidenan Semarang. Selain itu, banyak pengusaha gula di Semarang yang memiliki beberapa pabrik di wilayah Jepara; sehingga dalam hal produksi pabrik tersebut dimasukkan sebagai produksi gula di Karesidenan Semarang.

[24] Pieter Creutzberg dan J.T.M van Lennen (eds), *Sejarah Statistik Ekonomi,* Jakarta : Yayasan Obore Indonesia, 1987.

pertanian Jawa berpaling ke tanaman palawija untuk sekedar hidup dengan melarat dan harus membanting tulang dengan mempergunakan pola yang paling padat karya.[25] Seseorang akan menyewa atau menggadaikan tanahnya pada orang lain, yang membayarnya dengan uang, dan kemudian menjadi penggarap tanah itu kepada orang lain. Seseorang boleh jadi bersedia atau diberi kesempatan, untuk mengerjakan *tandur* (tanaman padi), dan *matun* (menyiang) dengan upah 1/5 hasil panen, dan dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut, dan orang yang kedua ini dapat pula mempekerjakan seorang buruh upahan atau mengikat perjanjian tukar-menukar tenaga kerja dengan tetangganya untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan.[26]

Dalam hal sewa-menyewa tanah, pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain, menerima benih yang diperlukan oleh penyewa, mengolah sendiri sawahnya dan menyerahkan separuh hasil panennya. Pada bentuk sewa yang lain, penyewa menerima separuh dari hasil panennya. Dari sawah dan tegalan, penggarap menerima separuh dari hasil, tetapi untuk tanaman tembakau 2/3. di daerah Rawapening (Ambarawa) yang subur, penggarap hanya menerima 1/3 serta bibit yang diperlukan. Pada jenis tanaman padi, jika kesuburan sawahnya sedang-sedang saja, penggarap menerima separuh; jika sawahnya subur ia menerima 1/3. pada tembakau, jagung, dan (padi) *gogo*, ia menerima 2/3.[27]

Bagi hasil atau sewa gadai atau sewa-menyewa, pada umumnya disebutkan dalam satu nafas, atau di-

---

[25] Cifford Geertz, Op.cit, 1983, hlm. 101.
[26] Cifford Geertz, Op.cit, 1983, hlm. 105
[27] A.M.P.A Scheltema, Op.cit, hlm. 147.

anggap agak identik. Demikian pula halnya dengan penyewa-pegadaian (*verpachting*) atau sewa gadai (*pacht*), pakai pinjam (*leengerbruik*) dan peminjam pakai (*bruikleeding*).[28] Bentuk paling umum yang didapati pada sewa ini, ialah suatu bentuk bagi hasil yang dibuat tiap kali untuk satu tahun atau untuk satu kali panen. Uang sewanya dibayar dalam bentuk natura. Di samping itu ada juga sewa yang dibayar dengan jumlah produk yang disetujui bersama sebelumnya. Jadi, dalam hal yang pertama, pemilik membagi resiko bersama penyewa; baik dalam hal hasil maupun dalam hal harga. Resiko ini sudah termasuk dalam harga sewa yang harus dibayar. Dalam kebanyakan hal, bagian yang harus diserahkan kepada pemilik berubah-ubah. Dari ¼ sampai ½, tergantung pada kualitas tanah dan keadaan irigasi. Sewa dengan jumlah uang yang tetap, jarang sekali terjadi.[29]

3.2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Di samping indigo, teh, dan tembakau jenis tanaman lain yang ditetapkan semasa sistem Tanam Paksa[30] adalah kopi dan tebu. Bahkan, kedua jenis ta-

---

[28] Ibid, hlm. 201.

[29] Ibid, hlm. 202.

[30] Sistem Tanam Paksa yang dijalankan atas prakarsa Van den Bosch, didasarkan atas prinsip wajib atau paksa dan prinsip monopoli. Prinsip wajib diljalankan menurut modal yang telah lama dilaksanakan Belanda di Priangan (Prenger Stelsel) atau menurut sistem yang pernah dilaksanakan VOC berupa penyerahan wajib. Berdasarkan prinsip wajib ini, maka pungutan dari rakyat ditetapkan bukan lagi berupa uang, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat di ekspor. Sementara prinsip monopoli dimanifesitasikan dengan memberi hak monopoli kepada Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), berupa wewenang dalam produksi pengangkutandan perdagangan hasil ekspor Jawa. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sedjarah Indonesia Baru*: 1500-

naman ini lebih khusus lagi tebu, boleh dikatakan merupakan primadonanya ekspor. Dalam hal penggunaan lahan pertanian, kopi dan tebu memiliki perbedaan yang besar. Kopi ditanam di lereng-lereng gunung, sedangkan tebu ditanam di sawah-sawah di dataran rendah. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh yang ditimbulkan kedua jenis tanaman pun berbeda pula. Tanaman kopi cenderung memperluas areal tanaman, sedangkan tebu relatif tetap dalam lahan yang sebelumnya sudah dibudidayakan oleh penduduk.

Usaha penanaman tebu untuk pasaran dunia dilakukan secara besar-besaran. Bagi masyarakat, pertanian tempat tanaman tersebut dilaksanakan, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Terlebih lagi jika diperhatikan, bahwa lahan penanaman tebu tersebut adalah persawahan yang terbaik dan subur yang mudah mendapat air, terdapat di dataran yang padat penduduknya.[31] Dengan demikian, penanaman tebu memerlukan lahan sawah penduduk yang sebelumnya ditanam padi, sedangkan kopi tidak. Bahkan kopi juga tidak memerlukan lahan yang sebelumnya telah dibudidaayakan oleh penduduk, tetapi membuka lahan baru untuk penanamannya.

Dalam hal penggunaan tanah penduduk ini, Sistem Tanam Paksa ini dianggap telah memaksa mengubah hak-hak pemilikan tanah desa menjadi milik bersama, dan dengan demikian merusak hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepentingan khusus bagi kelompok-kelompok pengusaha swasta yang ingin mengganti sistem ter-

---

1900; *Dari Emporium sampai Imperium*, jilid I, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 305-306.

[31] W. Huender, *Overzicht van den Economischen der Toestand der Inheemse Bevolking van Javaen Madoera*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921, hlm. 81.

sebut dengan bentuk eksploitasi mereka sendiri.[32] Selain itu, karena tuntutan akan tanah-tanh pertanian, maka Tanam Paksa sangat berpengaruh atas milik tanah, sehingga hak-hak perseorangan penduduk (petani) sangat dirugikan. Kemungkinan menuntut tanah-tanah menjadi milik bersama (komunal), diperkuat oleh adanya hak menguasai dari desa yang sejak dahulu terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga bertambah lemahnya hak milik perseorangan petani akibat pengaruh-pengaruh feodal. Hal ini ditambah pula dengan banyaknya tanah yang tidak terurus pada permulaan abad ke-19, sebagai akibat dari perpindahan untuk menghindarkan diri rodi.[33]

Menurut Burger, Sistem Tanam Paksa menyebabkan bertambahnya perjanjian-perjanjian antara orang-orang Indonesia mengenai penyerahan tanah untuk sementara waktu. Selain itu, stelsel Tanah Paksa mengajar mereka, yang untuk sementara, dengan sukarela atau dengan paksaan, tak mempunyai tanah pertanian harus mempertahankan hidupnya selama mereka tidak mendapatkan penghasilan dari tanah pertaniannya. Tetapi penduduk di daerah gula menjadi terbiasa dengan kehidupan tanpa tanah semacam itu untuk sementara waktu.[34]

Karena pemilik pabrik gula tidak diperkenankan memiliki tanah sendiri, maka mereka menyewanya dari penduduk setempat; terutama yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Mengenai sewa tanah menurut Burger, adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi penduduk

---

[32] Robert yan Niel, "Warisan Sistem Tanam Paksa buat Perkembangan Ekonomi Berikutnya", dalam Anne Booth, William J.O. 'Malley, dan Anna Weidemann (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1988, hlm. 117.

[33] D.H. Burger, Op.cit., 1962, hlm. 191.

[34] Ibid, hlm. 229.

desa. Sejak dahulu penduduk mengenal persewaan tanah pertanian antara mereka, walaupun persewaan itu biasanya jarang terjadi. Penjualan tanah komunal tidak diperbolehkan adat, demikian juga penualannya. Namun keadaan ini tidak berlangsung terus, dibawah stelsel Tanam Paksa timbul perubahan besar dalam pemakaian tanah. Terutama akibat daripada penyerahan tanah dengan paksa untuk ditanami tebu dan nila. Selain itu, di daerah-daerah tempat penanaman tebu dipusatkan, terjadi pergeseran pemakaian tanah antara desa sendiri. Pergeseran ini mengenai pertukaran tanah, yang timbul karena paksaan.[35] Pergeseran penggunaan tanah semacam ini juga terjadi di daerah tebu di Kabupaten Kendal. Karena luas tanah milik perseorangan tidak terlalu luas, hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pabrik yang bermaksud mengadakan perkebunan secara besar-besaran. Untuk itu pemilik pabrik gula berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh sewa tanah yang dapat merupakan satu kesatuan, yang terdiri dari tanah milik-tanah milik yang tidak luas tadi. Kalau ada tanah milik penduduk yang tidak disewakan dan letaknya berada diantara tanah yang telah disewa pabrik, maka tanah penduduk yang demikian ini digeser dan diganti dengan tanah yang lain, yang letaknya tidak berada dalam komplek tanah sewa pabrik. Hal ini disamping mempermudah pengawasan dan pemeliharaan, juga mempermudah pemotongan dan pengangkutan ke pabrik-pabrik penggilingan. Sudah barang tentu akibat yang lebih jauh lagi, adalah penghematan biaya. Dengan penghematan ini, keuntungan pabrik akan semakin besar.

---

[35] Ibid.

Mengenai sewa tanah ini sebenarnya juga sudah membudaya dalam masyarakat pedesaan di Kabupaten Kendal. Menurut Schelteme, di Karesidenan Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, dan Grobogan, hanya beberapa pedagang pribumi yang menyewa tanah dan menggarapnya dalam bagi hasil.[36] Menurut van Delden Loeme, sejak "dahulu kala" di Jawa ada kebiasaan untuk menggarap sawah milik orang lain dengan imbalan separuh atau sepertiga hasil panen.[37]

Di Kabupaten Kendal, perkebunan tebu tidak menghalangi pertanian padi, jagung dan bahan makanan lainnya. Menurut laporan tahun 1859 diperoleh data yang menunjukkan bahwa pertanian padi dapat berhasil baik dan dapat memberikan persediaan bahan pangan sampai pada panen tahun 1860 kepada penduduk.[38] Dalam hal keberhasilan panen padi di daerah tebu, menurut Geetz ada dua kemungkinan sebagai penyebabnya : 1) tebu biasanya ditanam di daerah-daerah beras yang terbaik; 2) penanaman padi itu dilakukan secara lebih efisien di daerah gula.[39] Selanjutnya Geertz juga menyatakan, daerah gula itu secara proporsi memiliki : 1) lebih banyak sawah; 2) lebih banyak penduduk; 3) meskipun lebih banyak sawahnya yang ditanami tebu, namun produksi berasnya lebih besar daripada produksi beras yang bukan di daerah gula. Apapun sebabnya, hubungan antara tebu, padi, dan kepadatan penduduk adalah jelas: ketiga-tiganya tumbuh dengan subur bersama-sama.[40] Pendapat Geertz ini memang sesuai dengan keadaan dan

---

[36] A.M.P.A. Schelteme, Op.cit, hlm. 79.
[37] Ibid, hlm. 138.
[38] Kultuur Archief 1858.
[39] Clifford Geetz, Op.cit, 1983, hlm.79.
[40] Ibid, hlm. 78.

kenyataan yang terjadi di daerah tebu di Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal yang merupakan daerah tebu untuk Karesidenan Semarang, belum pernah mengalami bahaya kelaparan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Demak dan Grobogan. Sekalipun membandingkan dua daerah yang memiliki keadaan geografi dan potensi alam yang berbeda tidak sepenuhnya benar, tetapi setidak-tidaknya dapat diperoleh suatu kenyataan bahwa perkebunan tebu juga tidak selalu menimbulkan penderitaan rakyat. Untuk seluruh Keresidenan di Pulau Jawa, perluasan penanaman tebu setempat seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel IV
Perkembangan Luas Tanaman Tebu di Tiap Keresidenan di Jawa dinyatakan dalam Bau.

Keresidenan	1833	1860	1910
Banten	2.254	-	-
Cirebon	1.460	4.200	15.000
Pekalongan	777	1.500	3.500
Tegal	560	3.200	10.030
Semarang	543	1.800	3.300
Jepara	5.118	3.700	8.800
Rembang	1.221	-	-
Banyumas	-	300	5.000
Madiun	3.512	800	6.400
Kediri	642	1.900	20.000
Surabaya	4.424	8.000	36.000
Pasuruan	8.361	6.000	13.000
Probolinggo	-	4.700	13.000
Besuki	3.850	2.000	7.000
Banyuwangi	-	-	-
Jumlah	32.722	38.100	141.300

Sumber : D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia*, jilid I, Cetakan Ketiga, Jakarta. Pradnjaparamita, 1962, hlm. 184-185.

Kabupaten Kendal memiliki sawah seluas 18.695 *bau*. Tahun 1861 dipergunakan untuk tanaman tebu seluas 1300 *bau*, dan pada tahun 1862 seluas 1600 *bau*. Dari luas tanah yang tidak disewa untuk perke-bunan tebu seluruhnya ada 17.395 *bau*, bila dipotong untuk upah *penderep* masih dapat menghasilkan padi sebanyak 292.350 pikul. Suatu jumlah yang masih cukup memadai untuk menghidupi jumlah penduduk Kabupaten Kendal yang mencapai 104977 jiwa.[41] Selain padi, penduduk juga membudidayakan tanaman pangan lainnya, seperti palawija.

Menurut laporan yang diterima oleh Inspektur perkebunan di *Afdeeling* 2, pada tahun 1860-an, perbandingan penanaman dengan pembagian antara keluarga-keluarga adalah satu berbanding enam. Sehingga setiap keluarga petani dapat mencukupi kebutuhannya dibandingkan dengan yang terdapat di Keresidenan lain, seperti Besuki, Probolinggo, Madiun, dan Tegal.[42]

Bukti lain bahwa perkebunan tebu tidak selalu menimbulkan penderitaan rakyat, juga bisa diperoleh dari data-data tahun sebelumnya. Pada paruh kedua tahun 1850-an, setiap keluarga petani dapat menyimpan bahan makanan untuk satu tahun dari hasil panennya. Dari panen padi yang diperkirakan secara merata, yang masih diusahakan ialah penanaman *palawija* seperti jagung dan ketela, yang secara besar-besaran

---

[41] Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.
[42] Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.

diangkut dari Kendal ke Semarang setiap tahunnya. Selain itu, penduduk juga masih dapat menjual hasil tanamannya ke daerah-daerah lain.[43]

Kabupaten Kendal hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Semarang, sehingga banyak penduduk di pedalaman kabupaten yang membawa hasil pertaniannya ke kota Semarang. Dari kota Semarang dibelinya berbagai barang kebutuhan seperti porselin, bahan pakaian dan lain-lain.[44] Dengan demikian, di Kabupaten Kendal, yang merupakan wilayah tebu untuk Keresidenan Semarang; komersialisasi pertanian sudah berlangsung cukup lama. Dalam hal komersialisasi pertanian, Tempel menjelaskan bahwa gejala semacam itu telah berlangsung di pedesaan Jawa sejak akhir abad ke-19, dengan ditandai berkembangnya sistem pemilikan tanah secara perseorangan.[45]

Komersialisasi pertanian ini telah menimbulkan polarisasi ekonomi, dengan tampilnya tuan-tuan tanah. Proses polarisasi ekonomi menurut Amaludin, telah terjadi sejak lama di pedesaan Jawa. Jaspan mengungkapkan bahwa sejak masa kolonial dahulu telah terjadi kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan kelas atas.[46] Dalam penelitiannya di Malang Selatan dan Bantul (Yogyakarta) pada tahun 1977, Kano menemukan bahwa di pedesaan Malang Selatan juga terdapat dan terjadi penguasaan tanah yang meruncing, sedangkan di pedesaan Bantul,

---

[43] Kultuur Archief 1858.
[44] Kultuur Archief 1861.
[45] Moh. Amaludin, Op.cit., hlm. 25.
[46] Ibid, hlm. 20.

meskipun terdapat gejala polarisasi tetapi tidak begitu meruncing.[47]

Meskipun hasil penelitian Kano itu dilakukan pada tahun 1977, namun bisa dipastikan bahwa polarisasi ekonomi yang kemudian juga mengakibatkan polarisasi sosial ini., sudah dan telah berlangsung jauh sebelumnya. Dalam studi sejarah, tidak ada kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, dan polarisasi ekonomi yang menimbulkan polarisasi sosial ini penyebab utamanya adalah perkebunan tebu sejak masa Sistem Tanam Paksa.

Dari hasil penelitian Amaludin pada tahun 1985 di desa Bulugede, yang juga merupakan 'desa tebu' di Kabupaten Kendal, ternyata juga telah timbul polarisasi sosial ekonomi di daerah tersebut. Kesenjangan luas penguasaan tanah pertanian di desa Bulugede ternyata cukup tajam (indeks Gini = 0,60). Kesenjangan ini secara tidak langsung, menurut pendapatnya, juga menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam dalam aspek distribusi pendapatan, karena tingkat pendapatan petani di desa ini berkaitan erat dengan penguasaan luas tanah pertanian. Dihubungkan dengan perkembangan distribusi luas penguasaan tanah pertanian sejak tahun 1960, kesenjangan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat petani setempat sedang berlangsung proses polarisasi ekonomi. Atau kecenderugan timbulnya masyarakat menjadi dua golongan ekonomi yang semula berbeda, dan akhirnya kepentingannya berlawanan; yaitu golongan miskin dan golongan kaya.[48]

---

[47] Hiroyoshi Kano, 'Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa', dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), Op.cit, hlm. 239 dan 249.

[48] Moh. Amaludin, Op.cit., hlm. XVIII.

Data perkembangan masyarakat petani Bulugede, sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1985, memberi keterangan bahwa polarisasi ekonomi di desa ini menimbulkan sistem stratifikasi petani, dari stratifikasi tradisional menjadi stratifiksi baru. Sebelum tahun 1960, stratifikasi petani di desa ini didasarkan atas perbedaan partisipasi dalam pengurusan tanah komunal, sedangkan hubungan sosial antara lapisan petani merupakan hubungan *simbiosis* yang diatur oleh lembaga-lembaga tradisional atau hubungan *patron-klien.* Sesudah tahun 1960, stratifikasi petani didasarkan atas perbedaan partisipasi dalam penguasaan tanah perseorangan; sedangkan hubungan sosial antarlapisan petani merupakan kombinasi antara hubungan *simbiose* dan konflik kepentingan.[49]

Ternyata apa yang disimpulkan Geertz, yang menyatakan bahwa penyesuaian involusional dari desa-desa Jawa dengan perkebunan tebu, tidak sepenuhnya benar. Menurut Geertz, penyesuaian involusional dari desa-desa Jawa dengan perkebunan tebu menghasilkan gejala tersendiri, yang hingga sekarang pun masih menjadi ciri daerah-daerah pedesaan Jawa. Gejala tersebut ialah : 1) sifat "pascatradisional" dari struktur sosial desa-desa ini; 2) semakin kuatnya sistem tanah komunal; 3) pengembangan produksi palawija, dan 4) semakin parahnya kemiskinan bersama dalam pembagian kesempatan bekerja serta pendapatan.[50] Di Kabupaten Kendal, khusunya di desa

---

[49] Ibid, hlm. XIX.

[50] Hiroyoshi Kano, 'Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Interpretasi Kembali', dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 18-19.

Bulugede, ternyata pemilikan tanah komunal justru melemah. Sebaliknya pemilikan tanah perseorangan justru semakin kuat. Akibatnya adalah, semakin banyaknya jumlah penyewa atau buruhtani yang menyewa dan atau mengerjakan tanah milik orang lain. Sebagian penyewa menggarap tanah sewanya dengan menggunakan tenaga kerja keluarga, meskipun kadang-kadang pula menggunakan buruhtani upahan. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan petani penyewa lebih kecil dibandingkan petani pemilik yang juga tidak mempekerjakan buruhtani upahan. Karena penyewa terikat kepada kekuasaan pemilik tanah; sedangkan petani pemilik terbebas dari ketergantungan semacam itu.[51]

Di pihak lain, terdapat petani penyewa yang mempekerjakan buruhtani upahan lebih dari satu, yakni sebagian besar pekerjaan penggarapan tanah sawahnya diperagakan oleh buruhtani upahan. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan petani penyewa cenderung lebih tinggi daripada petani pemilik bukan pengendali buruhtani. Bahkan hampir menyerupai kedudukan petani pemilik pengendali buruhtani karena penyewa memiliki kekuasaan utuk mengendalikan kehidupan ekonomi rumahtangga lain, yakni buruhtani tunawisma. Adanya keragaman bobot kekuasaan petani penyewa menimbulkan akibat terjadinya keragaman identitas sosial dan orientasi politik mereka.[52]

3.3 Upah dan Ketenagakerjaan

Sebelum diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa, pengolahan air tebu menjadi gula di Pulau Jawa un-

---

[51] Moh. Amaludin, Op.cit., hlm. 17.
[52] Ibid, hlm. 17-18..

tuk keperluan ekspor dilakukan dalam jumlah amat terbatas. Guna memutar penggilingan biasanya masih digunakan tenaga hewan. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi pabrik gula juga terbatas pada perkebunan-perkebunan milik orang-orang Cina dan Belanda yang terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Keadaan itu segera berubah drastis setelah diberlakukannya Sistem Tanam Paksa, dengan bermunculannya industri-industri gula berskala besar di beberapa daerah di Pulau Jawa, termasuk di Keresidenan Semarang. Bahkan menjelang tahun 1860-an, perubahan terjadi lebih dramatis dimana Jawa Barat yang semula merupakan daerah penghasil gula "terbesar", kedudukannya tergeser oleh daerah-daerah lain, termasuk oleh Jawa Tengah, yang relatif "baru" mengenal industri gula.

Masuknya industri gula di Pulau Jawa pasca diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa, disamping diakibatkan oleh tingginya harga gula di pasaran internasional, juga diakibatkan oleh kemudahan-kemudahan dalam memperoleh modal yang diberikan Van den Bosch dan gubernur jenderal-gubernur jenderal selanjutnya kepada para calon pengusaha gula di Pulau Jawa. Di sisi lain, G.R. Knight, mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah kolonial mengembangkan industri gula, disamping diakibatkan oleh adanya tebu bermutu tinggi yang makin lama makin terjamin persediaannya, juga ditentukan oleh keberhasilan para pejabat keresidenan dalam mempengaruhi membujuk, atau memaksa kaum tani menanam tebu dan menghasilkannya dengan baik.[53]

---

[53] G.R. Knight, "Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad ke-19: Studi dari Keresidenan Pekalongan1830-1870",

Lebih lanjut, G.R. Knight juga mengatakan setidaknya ada tiga hal penting yang kemungkinan besar telah menyebabkan berhasilnya upaya di atas. Pertama, digunakannya jalur-jalur wewenang tradisional oleh para pengusaha industri gula dalam memperoleh kesediaan kaum petani, kedua, digunakannya sistem pembayaran teratur terhadap petani produsen, berdasarkan hasil produksi pabrik mereka. Ketiga, adanya sikap pasrah dari para petani dalam menghasilkan tebu untuk industri yang mulai mekar. Karena tuntutan-tuntutannya tidak merusak ekonomi dan masyarakat pedesaan.[54]

Tumbuhnya industri gula yang berskala besar dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi di desa-desa, ialah perubahan institusi hubungan kerja tradisional. Institusi inilah yang pertama kali mengalami perubahan-perubahan, didesak untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan keadaan, yaitu pabrik-pabrik gula yang menghasilkan komoditas untuk perdagangan.[55]

Bagi penduduk desa, yang dalam pertaniannya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jiwa masyarakatnya, bekerja di pabrik-pabrik gula menimbulkan kesulitan khusus; karena pekerjaan ini

---

dalam Anne Booth, William J.O. 'Maley, dan Anna Weidemann (eds), Op.cit, hlm. 75-76..

[54] Ibid, hlm.76.

[55] Suhardjo Hatmosuprobo, "Pabrik-pabrik Gula di Jawa Pada Abad ke-19: Suatu Studi Prelimnier tentang Timbulnya Hubungan Kerja Bebas", dalam P.J. Suwarno, G. Mudjanto dan Suhardjo Hatmosuprobo (eds), *Sejarah Indonesia Dalam Monografi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi IKPI Sanata Dharma, 1980, hlm. 74.

dilakukan dengan pengawasan yang keras dan harus dilakukan dengan teratur. Kesulitan ini tidak begitu terasa dalm hal penanaman dan pemotongan tebu, karena pekerjaan ini lebih mendekati pertanian yang memang sudah menjadi kebiasaannya. Oleh karena itu, menurut Burger, lama kelamaan penduduk desa membuat peraturan untuk mengatur kerja yang "tidak enak" seperti di pabrik-pabrik. Telah menjadi kebiasaan umum, bahwa beberapa anggota desa diwajibkan melakukan pekerjaan di pabrik dan dibebaskan dari kewajiban lainnya. Orang yang kaya biasa menyuruh melakukan kewajiban-kewajiban kerja kepada orang lain, yang diberi upah lainnya. Peraturan ini banyak membantu penyesuaian rumahtangga desa kepada tekanan Tanam Paksa yang berat itu. Mengadakan peraturan-peraturan seperti itu adalah sesuai sekali dengan sifat desa. Hal serupa itu terdapat pula pada rodi yang juga masih terdapat di desa.[56]

Kesulitan-kesulitan tersebut diatas, baik yang dialami oleh pabrik maupun yang dialami oleh penduduk desa, akhirnya menimbulkan penyesuaian baru bagi desa. Hal ini, berarti suatu perombakan terhadap institusi hubungan kerja tradisional. Berhubungan dengan itu, sejak tahun 1837 mulai tampak adanya pekerja-pekerja upahan di kebun-kebun tebu, meskipun pada umumnya mereka itu sebenarnya masih setengah dipaksa. Pekerja upahan ini semakin berkembang, khususnya setelah Tanam Paksa.[57]

Sistem Tanam Paksa masih membawa perubahan-perubahan lain yang tidak diinginkan. Di kota-kota pelabuhan dan pabrik gula, mulai timbul kerja upahan yang sebelumnya hampir tidak dikenal. Karena

---

[56] D.H. Burger, Op.cit, 1981, hlm. 187.
[57] Suhardjo Hatmosuprobo, Op.cit, hlm. 76-77.

kewajiban untuk menyerahkan tanah pertanian guna kepentingan Tanam Paksa, maka sewa-menyewa tanah antara penduduk Indonesia bertambah banyak. Dengan demikian, telah dipersiapkan masuknya kerja dan tanah dalam lalu lintas perekonomian, dan telah diletakkan salah satu dasar perkebunan swasta di masa depan.[58]

Di perkebunan-perkebunan tebu, dapat dikatakan bahwa penanaman tetap bersendikan kerja wajib. Dalam pemotongan teh, pengangkutan dan di pabrik-pabrik, kerja wajib berangsur-angsur diganti dengan kerja bebas. Demikian pula dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemerintah, lambat laun lebih banyak digunakan kerja bebas. Dalam tahun 1849, untuk pertamakalinya dipergunakan dalam pembuatan pelabuhan-pelabuhan dan pekerjaan-pekerjaan pertahanan di Surabaya, dan terutama setelah tahun 1860 kerja bebas itu banyak juga dipergunakan. Di bawah Sistem Tanam Paksa, kerja upah bebas itu untuk pertamakalinya dipergunakan secara besar-besaran. [59]

Pada mulanya penggunaan air untuk kepentingan-kepentingan perkebunan tebu maupun pabrik guna menimbulkan berbagai kesukaran bagi rakyat. Kesukaran-kesukaran baru dapat dihilangkan ketika pabrik-pabrik gula mengganti penggilingan yang digerakkan oleh air dengan tenaga uap, yang pemakaiannya dianjurkan oleh pemerintah. Ketel uap yang pertama, dipasang di Probolinggo pada tahun 1836; dan hal ini merupakan permulaan berdirinya industri modern di Indonesia.[60] Kemudian, pada tahun 1853, pabrik sentrifugal pertama yang melakukan pemisahan

---

[58] D.H. Burger, Op.cit, 1977, hlm. 18..
[59] D.H. Burger, Op.cit, 1981, hlm. 191.
[60] Ibid, hlm. 195.

antara gula dan sirup secara efisien, diimpor ke Jawa. Dari 176 pabrik, 96 buah diantaranya terikat kontrak dengan pemerintah. 96 buah menggunakan ketel silinder tegangan, 57 buah memiliki ketel hampa udara, 57 buah memiliki ketel uap dan mesin, dan 15 buah menggunakan mesin sentrifugal. Sejumlah 92 pabrik yang menggunakan mesin, beroperasi menurut cara tradisional yang sedikit lebih diperbaharui.[61]

Salah satu keuntungan dari industri gula, menurut Huender ialah, bahwa dengan kemajuan dalam bidang ini telah membuka lapangan kerja dengan mempekerjakan penduduk di daerah-daerah gula yang semakin padat, yang jika tidak ada industri gula mereka akan sulit memperoleh penghasilan. Pada umumnya, penduduk hanya memiliki tanah yang tidak luas, bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali, sehingga tanpa industri gula mereka akan sulit untuk bertahan. Dengan adanya kesempatan kerja, sekalipun dengan upah rendah, mereka sedikit tertolong.[62]

Untuk mendukung perkembangan ekspor gula usaha-usaha pemerintah kolonial Belanda tidak hanya membangun infrastruktur seperti jalur kereta api baru,[63] tetapi juga menciptakan kebijakan-kebijakan

---

[61] Pieter Cruetzberg, dan J.T.M. van Laanen (eds), Op.cit, hlm. 274. pada tahun 1836 "alat vacum" yang dirancang untuk mempercepat proses penguapan atau reduksi. Tenaga hewan diganti dengan kincir air, kincir air pun diganti pula dengan mesin uap. Banyaknya jenis alat yang dimiliki memberi gambaran tentang perkembangan industri gula. Sejak tahun 1841, pabrik-pabrik baru menggunakan teknik produksi yang berasal dari industri gula bit Eropa.

[62] W. Huender, Op.cit., hlm. 88.

[63] Pembangunan jalur kereta api baru mulai dilaksanakan sejak pertengahan abad XIX, atau tepatnya sejak tahun 1852, yang ditandai dengan adanya swastanisasi pembuatan jalur perkeretaapian. Beberapa jalur kereta api yang baru yang berhasil

ekonomis yang menguntungkan para pemilik gula. Salah satu kebijakan yang sangat krusial bagi kelangsungan pabrik gula, ialah kebijakan pembangunan industri non pabrik gula. Seperti kita ketahui, salah satu faktor ekonomis yang penting bagi keberhasilan industri gula di Jawa, adalah tersedianya tenaga buruh yang murah. Untuk menunjang ekspor gula, maka perlu dilestarikannya situasi Pulau Jawa sebagai "*labour reserve*" dengan cara tidak membangun industri non gula, maka hal ini akan mengikat penduduk desa di jawa di desa mereka masing;-masing dan tergantung pada pabrik-pabrik gula sebagai satu-satunya sumber pekerjaan non pertanian bagi para petani Jawa. Hal ini sangat menguntungkan pemilik modal pabrik gula dan juga para pemlik modal lain yang membangun perkebunan non gula di luar Jawa, seperti perkebunan karet di Sumatera Utara. Dengan merekrut kuli-kuli Jawa, para pemilik modal Belanda berhasil membangun perkebunan di daerah tersebut dengan mudah.[64]

Menurut van Geldern, sebenarnya ada keenggangan terhadap pekerjaan dalam suasana perubahan modern. Suasana pekerjaan pribumi yang dimiliki dan sudah terbiasa, membuat pekerja itu puas dengan bayaran yang kurang. Sebaliknya, dapat dikatakan

---

dibangun pasca adanya swastanisasi ini antara lain jalur Semarang-Yogyakarta, jalur Batavia-Buitenzorg, jalur Batavia-Ambarawa, jalur Ambarawa-Solo, dan jalur Solo-Yogyakarta. Adapun peristiwa penting di bidang pembangunan jalur perkeretaapian terjadi tahun 1894, dengan dibukanya hubungan kereta api langsung Batavia-Surabaya. Lihat Sartono Kartodirdjo, Op.cit, hlm. 363-3634.

[64] Loekman Soetrisno, "Sektor Informal Wajah Baru Perekonomian Indonesia pada Masa Pasca 'Boonn Minyak'", dalam Mubyarto (ed), *Prospek Pedesaan 1986*. Yogyakarta, P3PK Universitas Gadjah Mada, 1986. hlm 66.

bahwa orang puas dengan upah yang kurang, supaya dapat bekerja lebih santai. Pendapat ini sebenarnya masih perlu dipertanyakan kebenarannya, sebab pengertian kerja bagi masyarakat Jawa khususnya, Indonesia umumnya berbeda dengan pada masyarakat Barat.

Para pengusaha perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa 1840-an keatas mengatakan, bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan lebih efisien daripada buruh paksa. Menurut van Niel, hal ini pasti benar jika diingat pekerjaan yang ditugaskan pada mereka. Tetapi pada akhir dasawarsa 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruhtani ke dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh buruh rodi, harus ditinggalkan karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekerja dengan upah yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebagian besar kaum tani Jawa tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan tetap memandang pekerjaan mereka sebagai beban yang harus dipikul dan dideritakan. Penambahan jumlah kerja paksa yang memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka para petani cara bagaimana bekerja di perkebunan-perkebunan baru. Tetapi hal ini tidak merangsang minat perorangan maupun dalam tanaman ekspor, karena pandangan petani Jawa terhadap pekerjaan tidak berubah.[65]

Hubungan kerja yang kurang serasi antara pengusaha dengan buruh ini, sebenarnya suatu hal yang biasa terjadi, bahkan sampai masa sekarang. Di satu pihak buruh berusaha mendapat upah yang sebesar-besarnya dengan kerja yang seringan-ringannya, sedangkan pengusaha berusaha mendapat keuntungan

---

[65] Robert van Niel, Op.cit., hlm. 113.

yang sebesar-besarnya, dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dari adanya perbedaan kepentingan yang cenderung bertentangan ini sudah pasti menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu ada baiknya mengutip pandangan Marx, mengenai sebab terjadinya konflik semacam ini. Menurut Marx, kaum kapitalis, yaitu pemilik pribadi dari alat-alat produksi, merampas nilai lebih dari apa yang telah diciptakan oleh manusia dengan kerjanya dan memberikan kaum pekerja tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjaga hidupnya. Konsekuensinya, menurut Marx, selalu ada dua kelas utama yang bertentangan satu sama lain dalam setiap masyarakat tertentu, yang menguasai alat-alat produksi dan yang lain yang hanya mempunyai kemampuan kerja.[66]

Hadirnya mesin-mesin produksi di dalam suatu pabrik, telah mengakibatkan masalah tersendiri. Menurut Daldjoeni, suasana teknik yang dimiliki manusia ikut menentukan struktur hubungan antar manusia. Di suatu pabrik dengan *massa* buruhnya yang menyajikan produksi untuk pasaran yang tak dikenal, hubungan buruh dengan majikannya atau buruh dengan buruh, lain sekali dari di suatu pertukangan kecil yang bekerja tanpa mesin. Tata kerja manusia kota selain dilayani oleh kemajuan teknik, juga diatur bahkan dipengaruhi oleh jaringan transportasi dan komunikasi yang serba mekanistis. Industrialisasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan material.[67]

Pendapat Daldjoeni ini, mungkin benar untuk masa awal timbulnya industrialisasi di negara-negara sedang berkembang, seperti sekarang ini. Namun pen-

---

[66] Maurice Duverger, Op.cit., hlm. 210.
[67] Daldjoeni, Op.cit, hlm. 18.

dapatnya ini tidak berlaku lagi, manakala industrialisasi sudah semakin maju. Ternyata sekarang, terbukti bahwa industrialisasi justru menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat tidak diharapkan. Timbulnya pencemaran lingkungan akibat industrialisasi, ternyata justru telah menimbulkan penderitaan moril maupun materiil umat manusia, yang penanggulangannya memerlukan biaya yang tidak kecil.

"Modernisasi" pabrik-pabrik gula di Jawa sejak tahun 1830 dan tahun 1860, dapat kita lihat dari tabel V berikut ini :

Tabel V

Biaya Pembangunan Pabrik-Pabrik Gula Menurut Teknik Produksi yang Berbeda-beda pada Tahun 1830-1860 dalam Ribuan Gulden (F)

Teknik Produksi	Milik Pemerintah				Milik Swasta			
	1830		1860		1830		1860	
	Gdg	Msn	Gdg	Msn	Gdg	Msn	Gdg	Msn
a.Tradisional	38	19	-	-	20	19	-	-
b. Lb Modern	-	-	49	38	-	-	25	58
c. Eropa	-	-	56	46	-	-	29	49
d. Mutakhir	-	-	93	160	-	-	40	80

Keterangan :
Angka-angka itu merupakan hasil kalkulasi yang didasarkan pada ukuran rata-rata, pabrik kontraktor kira-kira dua kali lebih besar dibanding dengan pabrik swasta.

Lb = diperbarui dalam pengertian teknik
b = meliputi silinder tekanan dan mesin uap
mutakhir = (teknik d) = berarti penggunaan ketel uap yang lebih luas untuk tujuan pemutaran maupun perlengkapan sentrifugal.
Gdg = Gedung
Msn = Mesin

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (ed.), *Sejarah Statistik Indonesia*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 273-275.

Pembaharuan guna meningkatkan produksi gula, juga terjadi di pabrik-pabrik Kabupaten Kendal. Di pabrik Puguh dan Gemuh, sejak tahun 1860 dan 1861, para pengusaha mulai menggunakan cara pengolahan baru. Di pabrik gula Cepiring, salah satu dari tiga mesin silindernya, digerakkan dengan tenaga uap yang berkekuatan 8-10 tenaga kuda, sedangkan yang dua lagi, masih menggunakan tenaga air. Adapun upah yang diberikan untuk setiap pekerja dengan perantaraan penguasa, untuk setiap pabrik ditetapkan 18 sen per hari.[68]

Dengan diterapkannya mekanisasi dalam industri gula, secara otomatis menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian. Hal ini terjadi mengingat dalam industri yang menggunakan mesin-mesin produksi, memerlukan pola kerja yang berbeda dengan pola kerja yang selama ini dikenal buruh. Di samping membawa kemajuan produksi, mekanisasi ini juga menimbulkan berbagai kerugian. Menurut Daldjoeni, kerugian mekanisasi terletak pada *tempo*. Manusia dengan bekal struktur psikis dan sikap hidupnya, pada dasarnya sulit untuk menyesuaikan dengan *tempo* tersebut. Manusia kota menjadi makin sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman *tempo* kehidupan mekanistis, karena mekanisasi memang dibutuhkan demi kelestariannya.[69]

Menurut Geertz, industri gula di Jawa berbeda dengan di Jamaika. Industri gula di Jawa tidak di-

---

[68] Kultuur Archief 1858.
[69] Daldjoeni, Op.cit, hlm. 18.

bangun di atas landasan budak belian impor yang tidak punya tradisi petani. Berbeda dengan Puerto Rico, misalnya, industri gula itu tidak memaksa kaum tani yang baru melembaga untuk digiring masuk ke perkebunan enklava, dan menurunkan derajad mereka menjadi angkatan kerja yang tidak memiliki tanah, sepenuhnya menjadi kaum proletar. Buruh tebu di Jawa adalah tetap petani yang sekaligus menjadi kuli, tetap petani rumahtangga yang berorientasi komunitas dan sekaligus juga buruh upahan. Kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai pabrik.[70]

Ada seorang pejabat tinggi yang menyatakan bahwa di bawah Sistem Tanam Paksa itu, kaum tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama dari jam kerja yang dituntut dalam masa sebelum 1830. pada umumnya, imbalan yang diterima oleh kaum tani itu dalam bentuk hasil budidaya atau upah yang sama-sekali tidak seimbang dengan tambahan waktu dan jerihpayah yang dituntut dari mereka, dan juga jauh dibawah harga pasaran dari hasil budidaya itu, dan berkenaan dengan budidaya ekspor yang ditanam pada tanah desa, imbalan yang diterima jauh dibawah nilai pendapatan yang diperoleh andaikata tanahnya itu dipakai untuk tanam pangan.[71]

Tekanan Sistem Tanam Paksa sebenarnya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti misalnya di Jepara dan Pasuruan. Di Keresidenan Jepara, dalam tahun 1840 terdapat tekanan yang berat dari banyaknya rodi dan pekerjaan penanaman untuk

---

[70] Clifford Geertz, Op.cit, hlm. 94.

[71] R.E. Nelson, "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani Pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa", dalam Anne Booth, William J.O. Malley dan Anna Weidemann (eds), Op.cit., hl. 45-46.

tebu, nila, teh, nopal dan kopi, dan untuk penebangan kayu, disamping itu terdapat pula pungutan-pungutan dalam bentuk uang. Untuk penanaman tebu, yang terlalu diperluas, orang harus bekerja sampai 15 atau 30 pal. Dengan demikian penduduk mentelantarkan tanah-tanah pertanian mereka sendiri dan tak mempunyai waktu untuk memotong padi di keresidenan-keresidenan lain. Karena itu dalam pertengahan pertama tahun 1841 kira-kira 2.000 orang penduduk pindah ke Grobogan, dan pada waktu kemudian lebih banyak lagi. Setelah diambil tindakan-tindakan perbaikan, maka penduduknya bertambah lagi. Dalam tahun 1850 orang masih mengeluh tentang terlalu besarnya penanaman yang dipusatkan, dimana orang-orang harus bekerja menempuh jarak yang terlalu jauh. Segala kerja paksa itu disini diberi upah yang tidak cukup.[72]

Ketika kemudaian semasa tenaga bebas mucul di perusahaan-perusahaan gula, pekerjaan ini untuk sebagian besar dilakukan oleh golongan rakyat yang terdiri dari pengembara. Pada tahun 1853 dikatakan tentang mereka bahwa, mereka terdiri dari "segala macam orang yang datangnya dari keresidenan lain, tak jarang setelah tersangkut perkara-perkara polisi". Dari mereka tidak bisa mengharapkan banyak, jumlahnya selalu berganti-ganti dan tidak tetap. Pada tahun 1866, sebagian besar tenaga perusahaan terdiri dari pengembara. Dr. Levert dalam tesisnya memberi berbagai keterangan tentang hal itu. Pengembara itu paling banyak bekerja sebagai kuli potong. Sebelum perang pun, diantara pekerja itulah yang paling banyak jumlah "bajingan" pengembara.[73]

---

[72] D.H. Burger, Op.cit., 1981, hlm. 199.
[73] D.H. Burger, Op.cit., 1977, hlm. 101.

Ketidakpastian memperoleh tenaga kerja, telah mendorong pengusaha pabrik utuk menerapkan kerja bebas, dengan memberi uang muka. Namun hal ini juga ternyata mendapat kesukaran. Sebab penduduk yang sudah mendapat uang muka seringkali tidak menepati perjanjian-perjanjian. Bahkan mereka bekerja pada majikan yang lain lagi, dengan harapan memperoleh gaji yang lain lagi.

Upah yang diterima tiap penduduk, berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, bahkan juga antara yang satu dengan yang lain. Untuk perkebunan gula di Kabupaten Kendal, pihak penguasa menyediakan tenaga-tenaga pemotong. Untuk pabrik Puguh dan Gemuh, masing-masing 225 orang tenaga pemotong; sedangkan untuk pabrik Kaliwungu 250 orang, dan pabrik Cepiring 300 orang setiap harinya. Tenaga pemotong ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan saja, jadi tidak ada hubungannya dengan luas tanah perkebunan. Tenaga-tenaga pemotong ini minta upah 25 sen untuk pekerjaan siang, dan 30 sen untuk pekerjaan malam hari. Upah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya 20 sen.[74]

Pada tahun 1864, untuk pabrik Puguh dan Gemuh, dicukupi dengan tenaga kuli 250 orang, tetapi setahun kemudian (1865) dikurangi menjadi 225 orang. Pada permulaan musim giling tahun sebelumnya. Jika benar-benar dibutuhkan, kepada orang-orang yang telah ditunjuk, atas permohonan pemilik pabrik, diperkenankan untuk menambah tenaga, berdasarkan surat Direktur Perkebunan tanggal 28 Juli 1865 No. 2980/20. tentang hal ini telah diadakan penelitian, dan dari keterangan yang diperoleh, tidak ada hal-hal yang

---

[74] Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.

kurang wajar atau penyalahgunaan dari pihak pabrik terhadap tenaga-tenaga yang diperoleh.[75]

Berkaitan dengan industri gula dan produksinya, di kota Semarang telah didirikan sebuah gedung penyimpanan gula. Gudang ini milik Mayor Tan Tiang Tjhing, yang membeli persil tanah dan mendirikan gudang di tanah itu. Gula yag disimpan dalam gudang, adalah hasil produksi pabrik miliknya; sehingga kampung tempat didirikannya gudang gula itu kemudian disebut "Gedong Gula".[76] Selain itu, mengingan Semarang merupakan pintu gerbang "ekspor-impor" di Propinsi Jawa Tengah dan daerah "*vorstenladen*" (Daerah Kerajaan Yogyakarta-Surakarta), maka dipelabuhannya juga memiliki banyak gudang penyimpanan komoditas ekspor-impor. Di antara komoditas ekspor yang banyak menggunakan jasa pergudangan, adalah gula. Hal ini disebabkan karena gula seperti juga telah dikatakan dimuka, merupakan "primadona" ekspornya.

Selain sebagai pusat perdagangan gula, di Semarang juga banyak bermukim pengusaha-pengusaha "besar" gula. Dua orang Cina menjadi yang pedagang besar "gula" dan sangat terkenal di kalangan penduduk kota, pada tahun 20-an adalah Oei Tiong Ham dan oei Tjoe. Oei Tjoe kemudian mendirikan perusahaan pada tanggal 1 Maret 1863, yang merupakan persekutuan dagang antar famili atau kongsi yang diberikan nama "Kian Gwan", yang berarti "Sumber dari Segala Kesejahteraan". Sebelum berdiri kongsi Kian Gwan, Oei Tjoe Sien berdagang barang-barang impor yang dibutuhkan oleh orang-orang Cina, misalnya dengan mengekspor gula dan tembakau ke Cina. Oei Tjien Sien, kemudian digantikan oleh Oei Tiang Ham sebagai pim-

---

[75] Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2.
[76] Hartono Kasmadi dan Wiyono, Op.cit., hlm. 88.

pinan kongsi. usaha perdagangannya semakin berkembang, dengan cabang-cabangnya di Jakarta dan Surabaya; bahkan memiliki beberapa pabrik gula dan tapioka.[77]

Untuk meningkatkan produktivitas ekspornya, Oei Tiang Ham mengirim pemuda-pemuda Cina untuk belajar dalam bidang perdagangan dan industri gula di Rotterdam dan Delf di Negeri Belanda. Setelah mereka kembali ke Hindia Belanda (Indonesia), dipekerjakan di pabrik-pabrik gula dan tapioka miliknya dan menjadi tenaga ahli dalam bidang perlistrikan dan organisasi.[78] Berkat berbagai usahanya inilah, Oei Tiang Ham kemudian tampil sebagai "Raja Gula" di Jawa.

---

[77] Ibid, hlm. 83-84.
[78] Ibid, hlm. 84.

BAB IV

KESIMPULAN

Seperti halnya pada masyarakat lain di dunia, pada mulanya orang Jawa belum mengenal komersialisasi tenaga kerja, termasuk juga penduduk di Keresidenan Semarang. Kebutuhan tenaga kerja dipenuhi oleh tenaga keluarga dan bila melakukan pekerjaan-pekerjaan "besar", yang oleh dirinya atau tetangganya dianggap tidak akan mampu untuk dikerjakan dengan tenaga kerja keluarga, maka secara sukarela para tetangga akan memberikan bantuan tenaga kerja guna melakukan pekerjaan itu. Kerjasama bersama secara sukarela ini dalam masyarakat Jawa dikenal dengan nama "Gotong Royong", yang apabila tetangganya membutuhkan tenaga kerjanya, maka orang yang bersangkutan harus pula bersedia melakukannya.

Kerja "Gotong Royong" ini ada berbagai macam bentuk, misal dalam pembuatan rumah, "bersih desa", membuat saluran irigasi, membuat jalan desa, menjaga keamanan desanya dan lain-lain. "Gotong Royong" dalam membuat rumah misalnya, dikenal dengan na-

ma "*sambatan*", sedangkan "Gotong Rotong" dalam menjaga keamanan desanya biasa disebut dengan "*ronda*". Istilah ini kemudian menjadi istilah nasional yang banyak dipakai oleh berbagai masyarakat atau suku bangsa.

Pada mulanya, cara kerja yang demikian ini masih sesuai dengan pola hidup dan kebutuhan hidupnya, yang pada waktu itu masih hidup dalam sistem ekonomi subsisten. Kebutuhan hidupnya masih dapat memenuhi oleh kerja keluarga dan kebutuhan pangannya masih dapat dipenuhi oleh hasil buminya. Dari berbagai hasil bumi, maka padi merupakan tanaman utamanya yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah anggota keluarga, maka semakn meningkat pula kebutuhan hidupnya. Pandangan hidup "banyak anak, banyak rezeki" sangat berperan dalam meningkatnya kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup ini, datanglah bangsa Belanda ke Indonesia. Sesuai dengan tujuan kedatangannya ke Indonesia, untuk berdagang dan mencari keuntungan, maka dengan berbagai cara Belanda berusaha untuk meluaskan usahanya. Salah satu bentuk usaha yang dilakukannya, adalah membuka perkebunan besar di Jawa, dengan berbagai jenis tanaman yang hasilnya laku keras di pasaran Eropa.

Keresidenan Semarang sebagai salah satu daerah jajahannya, juga diusahakan berbagai kepentingan itu. Beberapa komoditas ekspor yang diusahakan di Keresidenan Semarang antara lain: kopi, cacao, dan tebu. Dari ketiga komoditas ini, gula (tebu) yang paling memberikan prospek baik, sehingga tanaman ini dibudidayakan secara besar-besaran di Pulau Jawa. Di Keresidenan Semarang saja ditanam di empat keca-

matan, yang tentunya banyak menyita penggunaan tanah dan memerlukan banyak tenaga kerja.

Dengan tumbuhnya berbagai macam perkebunan ini, yang paling banyak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lahan pertanian yang luas, adalah tanaman tebu. Karena pemilik perkebunan besar tidak memiliki tanah sendiri, maka menyewanya dari penduduk. Adapun tanah yang dipergunakan untuk tanaman tebu ini adalah sawah, yang memang sangat cocok untuk tanaman tebu. Kebutuhan akan tanah ini dipenuhi dengan melalui sistem sewa kepada penduduk, yang tentunya letaknya berdekatan dengan pabrik pengolahannya, yakni pabrik gula. Sejak saat itu penduduk desa mulai mengenal sistem sewa dengan bentuk uang, yang sebelumnya hanya dikenal sistem bagi hasil atau cara lain.

Disewanya tanah penduduk oleh pemilik pabrik gula, maka dengan sendirinya penguasaan tanah penduduk beralih kepada si penyewa, yang memiliki pabrik gula. Karena sistem sewa yang dijalankannya melalui bantuan para *pamong* desa, maka pelaksanaanya dapat berjalan lancar. Tenaga kerja upah yang sebelumnya belum dikenal oleh pendduduk desa, makin lama semakin meluas dan membudaya. Dengan masuknya perkebunan tebu dengan pabrik gulanya, maka komersialisasi tenaga kerja mulai dikenal oleh penduduk desa. Bekerjanya penduduk desa di perkebunan tebu dengan pabrik gulanya, maka dalam masyarakat desa kemudian tumbuh kelas sosial baru, yakni kelas buruh. Selain itu, tumbuhnya perkebunan tebu dengan pabrik gulanya juga telah menjadi dasar tumbuhnya industrialisasi di Jawa. Gula merupakan komoditas pertama yang diekspor dalam bentuk barang jadi, sedangkan komoditi lainnya hanya diekspor

dalam bentuk barang mentah atau barang setengah jadi.

Pabrik yang memerlukan pengelolaan administrasi yang baik, juga telah menjadi dasar bagi sistem administratif di perkebunan lain yang kemudian tumbuh. Adanya pabrik gula, penduduk telah diperkenalkan dengan sistem administrasi "modern" yang berbeda dengan yang dikenal penduduk sebelumnya. Selain memperoleh keuntungan dari komersialisasi tenaga kerja maupun sewa tanah, maka penduduk juga dapat memperoleh manfaat lain yang dibuat oleh pemilik pabrik, seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Dengan demikian pabrik gula banyak memberikan manfaat bagi penduduk.

==========

DAFTAR SUMBER

A. Arsip
   1. *Nota Inspektur Perkebunan di Afdeeling 2 .*
   2. *Kultuur Archief 1858*.
   3. *Kultuur Archief 1861*.

B. Buku
   1. Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Suryomihardjo (eds), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta : P.T. Gramedia, 1985.
   2. Alatas, S.H., *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*,Jakarta: LP3ES, 1988.
   3. Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Pulsar Yayasan Ilmu Sosial, 1980.
   4. Amaluddin, Moh., *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede Kabupaten Kendal-Jawa Tengah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987.

5. Booth, Anne, William J.O' Malley, dan Anne Weidemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988.
6. Breman, Jan., *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Cetakan I, Jakarta: LP3ES, 1966.
7. Buger D.H., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Terjemahan Prayudi, Jilid I, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
8. Burger D.H., *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1977.
9. Chambers, Robert., *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1987.
10. Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen (eds), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
11. Daldjoeni, N., *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Bandung: Alumni, 1979.
12. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid I, Cetakan Kedua, 's Grevenhage: Martinus Nijhoff, 1917.
13. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid II, Cetakan Kedua, 's Grevenhage: Martinus Nijhoff, 1918.
14. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid III, Cetakan Kedua, 's Grevenhage: Martinus Nijhoff, 1919.
15. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid IV, Cetakan Kedua, 's Grevenhage: Martinus Nijhoff, 1920.
16. Geertz, Clifford., *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Ceta-

kan Kedua, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983.

17. Geertz, Clifford., *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
18. Huender, W., *Overzicht van dan Economischen der Toestand der Inheemse Bevolking van Java en Madoera*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921.
19. Kartodirdjo, Sartono., *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelmpok Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1987.
20. Kartodirdjo, Sartono., *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, jilid I, Jakarta: Gramedia, 1987.
21. KAmadi, Hartono dan Wiyono (eds), *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985.
22. Keeler, Suzanne., *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.
23. Lenski, Gerhard E. *Power and Previlege: A Theory of Social Stratification*, New York/St. Louis/San Fransisco/Toronto/London/Sydney: Mcgraw Hill Book Company, 1966.
24. Manning, Chris dan Tadjudin Nor Effendi (eds), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sek-*

tor Informal di Kota, Jakarta: P.T. Gramedia, 1985

25. *Memori Serah Jabatan 1921-1930*, Jakarta: Arsip Nasional, 1977.
26. Moertono, Soemarsaid., *State and Statecraft in Old Java: A Study of Later Mataram Period 16th to 19th Century*, Monograph Series. Modern Indonesia Project South Esat Asia Program, Department of Asia Studies, Cornell University, Ithaca, New York, Reprinted 1974.
27. Mulder, Niels., *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984.
28. Nagazumi, Akira (ed)., *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1968.
29. Paloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : C.V. Rajawali, 1984.
30. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Depdikbud, 1978.
31. Sayogo (ed), *Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Rajawali, 1982.
32. Sceltema. A.M.P.A, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Ceatakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
33. Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Substansi di Asia Tenggara,* Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES, 1983.
34. Sosrodihardjo, Soedjito., *Perubahan Struktur Masyarakat Jawa: Suatu Analisa*, Yogyakarta, Penerbit Karya, 1968.

35. Soedarsono, Djoko Soekiman dan Retna Astuti (eds), *Peranan Kebudayaan Deaerah dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional*, Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud, 1985.
36. *Statuten van de Naamlooze Venootschap Semarang-Joana Stoomtrammaatschapij*, 1882.
37. Suwarno, P.J. et.al (ed), *Sejarah Indonesia dalam Monografi*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Geografi IKIP Sanata Dharma, 1980.
38. Suryo, Djoko., *Social and Economic Life in Rural SemarangUnder Colonial Rule in the Later 19th Century*, Tesis Doktor pada Monash University, Australia, December, 1982.
39. Tjondronegoro, Soediono, M.P. dan Gunawan Wiradi (eds), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984.
40. Veth P.J., Java: *Geographic, Ethnologisch, Historisch*, Jilid II, Cetakan Ke II, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912.
41. Veth P.J., Java: *Geographic, Ethnologisch, Historisch*, Jilid III, Cetakan Ke II, Harlem: De Erven F. Bohn, 1912.

C. Majalah/Makalah/Surat Kabar

1. *Agro-Ekonomika*, No. 21 Tahun XIV, Agustus 1983.

2. *Agro-Ekonomika*, No. 23 Tahun XVI, Agustus 1985.
3. *Buletin Yaperna*, No. 17, Tahun III.
4. *Makalah*, Gunawan Wiradi: Seminar "Desa dlam perspektif Sejarah", Yogyakarta: PAU Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, tanggal 10-11 februari 1988.
5. *Kompas*, 2 Januari 1989.
6. *Prisma*, no. 8, 1984, No. XIII.
7. *The Developing Economics*, Vol. XVIII, No. 1., March, 1980.